

# ANALISIS KINERJA PENDIDIKAN PROVINSI ACEH



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2015**

## KATALOG DALAM TERBITAN

Sudarwati

Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Aceh  
Sudarwati.—Editor Ida Kintamani.—Jakarta: Pusat Data dan Statistik  
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan, 2015  
iv, 59p;28 cm

ISBN: 979-401-569-5

1. Kinerja Pendidikan
2. Misi 5K
3. Provinsi Aceh
4. Kemdikbud
5. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

## ANALISIS KINERJA PENDIDIKAN PROVINSI ACEH

Penyusun : Sudarwati, M.Si  
Nara Sumber : Ir. Siti Sofiah, M.Sc  
Dra. Ida Kintamani, M.Sc

Desain Sampul: Abdul Hakim, S.Kom

@2015 PDSPK



**ANALISIS KINERJA  
PENDIDIKAN PROVINSI ACEH**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2015**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dengan adanya pendidikan diharapkan kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di daerah secara efektif merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan data analisis terhadap anggaran publik Aceh tahun 2012, banyak pembangunan sektor pendidikan yang masih mementingkan pembangunan infrastruktur tapi meninggalkan pembangunan mutu pendidikan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan termasuk didalamnya pendayagunaan data merasa perlu melakukan suatu kajian tentang kinerja pendidikan provinsi Aceh. Kajian ini diberi judul "Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Aceh". tujuan dari analisis ini adalah untuk mengukur kinerja dalam dunia pendidikan pemerintah daerah Provinsi Aceh.

Dalam menghitung kinerja pendidikan hanya digunakan Misi 1-5 yang akan dihitung dengan menggunakan penghitungan indikator pendidikan. Dalam menentukan kinerja pendidikan yang berdasar pada misi Kemdikbud 2014 diperlukan indikator-indikator yang berasal dari data pendidikan maupun data nonpendidikan. Berdasarkan Misi Pendidikan K5 maka indikator pendidikan dikategorikan menjadi Misi K1 sampai Misi K5.

Berdasarkan analisis indikator didapatkan hasil bahwa nilai kinerja pendidikan yang dicapai Provinsi Aceh sebesar 80,23 yang berarti masuk dalam kategori pratama. Misi K2 yang merupakan keterjangkauan layanan pendidikan mempunyai nilai yang terbaik diantara kelima misi. Nilai yang dicapai sebesar 98,99 yang berarti masuk dalam kategori paripurna. Besarnya nilai Misi K2 ini karena nilai TPS dan DT untuk Provinsi Aceh sudah baik. Jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah sudah mencukupi untuk menampung penduduk usia sekolah. Sedangkan Misi K1 yang merupakan ketersediaan layanan pendidikan mempunyai nilai yang terendah diantara misi yang lain. Nilai yang dicapai sebesar 57,33 yang berarti masuk dalam kategori kurang. Kecilnya nilai Misi K1 ini terjadi karena banyak sekolah yang belum memiliki prasarana sekolah seperti ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga dan ruang laboratorium. Nilai Misi K3 yang merupakan kualitas layanan pendidikan juga masih termasuk dalam kategori kurang yaitu 64,81. Hal ini disebabkan banyaknya prasarana pendidikan yang masih dalam kondisi rusak. Nilai APK

dan APM jenjang SM Provinsi Aceh masih rendah dan masih banyak guru yang tidak layak mengajar di jenjang SD dan SMP.

Untuk meningkatkan Kinerja Pendidikan Provinsi Aceh maka hendaknya pemerintah daerah Provinsi Aceh perlu melakukan pembangunan prasarana pendidikan seperti ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga dan laboratorium di semua jenjang serta perlu rehabilitasi prasarana yang ada supaya dalam kondisi baik sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Sekai itu, untuk meningkatkan nilai APK dan APM jenjang SM dengan membangun sekolah jauh supaya akses untuk sekolah menengah menjadi mudah bagi daerah-daerah yang belum terlayani sekolah menengah. Dalam memenuhi kelayakan guru mengajar di jenjang SD dan SMP maka perlu dilakukan banyak pelatihan guru dan memberikan beasiswa kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## KATA PENGANTAR

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mempunyai keistimewaan karena mempunyai otonomi khusus. Sebagai Provinsi yang merupakan salah satu daerah yang mendapatkan dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat, masih banyak permasalahan yang dihadapi seperti oleh provinsi Aceh dalam sektor pendidikan. Oleh karena itu Pusat Data dan Statistik Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan termasuk didalamnya pendayagunaan data merasa perlu melakukan suatu kajian tentang kinerja pendidikan provinsi Aceh. Kajian ini diberi judul “Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Aceh”.

Sumber data pendidikan yang akan digunakan dalam analisis ini merupakan data dari dinas pendidikan kabupaten kota yang ada di wilayah provinsi Aceh yang kemudian digabung menjadi data untuk provinsi Aceh. Selain data pendidikan dari dinas kabupaten/ kota, digunakan juga data nonpendidikan yang bersumber pada Badan Pusat Statistik. Berdasarkan indikator pendidikan yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan, dengan menggunakan misi pendidikan 5K yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian dalam memperoleh layanan Pendidikan maka dihasilkan kinerja pendidikan berdasarkan misi pendidikan 5K.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihaksehingga buku ini dapat disusun. Saran masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2015  
Kepala,

Dr. Ir. Bastari, MA  
NIP. 19660730 1990011001

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Indikator Pendidikan .....	8
2.2. Metodologi.....	16
BAB III HASIL ANALISIS .....	18
3.1. Keadaan Nonpendidikan .....	18
3.2. Keadaan Pendidikan.....	22
BAB IV PENUTUP .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dengan adanya pendidikan diharapkan kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Fungsi dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan hak asasi setiap orang. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 31, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia salah satunya dengan menerapkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun didasari konsep "pendidikan dasar untuk semua" (*universal basic education*), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama dalam Bab III pasal 4 ayat 1 juga menyatakan bahwa

pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pada Bab IV, Pasal 5 Ayat 1 juga dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu pengembangan kualitas sumberdaya manusia juga merupakan bagian dari program-program pembangunan di Indonesia terkait erat dengan komitmen internasional dalam mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah dicanangkan sejak tahun 2000 melalui deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam kehidupan masyarakat, pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan rata-rata sekolah digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk dari suatu masyarakat, maka diharapkan akan semakin baik juga kualitas sumberdaya manusianya. Pendidikan dapat memberikan nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotorik kepada setiap individu disamping juga dapat digunakan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pendidikan bagi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan sangatlah penting.

Mengenai masalah pendidikan, perhatian pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ini tercermin dari masih banyaknya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, serta distribusi guru yang

belum merata. Dampak dari rendahnya kualitas pendidikan akan mengakibatkan keterpurukan negara ini. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya pemerintah pusat maupun daerah bekerjasama untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Reformasi desentralisasi pada awal tahun 2000 telah menjadikan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan-layanan dasar. Hal ini membuat pemerintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Akses ke Pendidikan Dasar menjadi prioritas utama pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mencapai Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) dan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pemerintah Indonesia di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Perkembangan pendidikan anak yang ditandai oleh peningkatan kualitas pendidikan sangat penting artinya dalam penuntasan wajib belajar. Dalam rangka Wajib Belajar, diupayakan bagi setiap anak usia sekolah untuk menempuh tingkat pendidikan dasar secara tuntas. Dengan melalui jenjang pendidikan tersebut diharapkan anak usia sekolah pendidikan dasar yang merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing terhadap sumber daya dari negara lain. Salah satu upaya dalam pembentukan sumber daya manusia yang bermutu adalah dengan meminimalkan jumlah anak putus sekolah karena putus sekolah akan dapat menghambat keberlanjutan siswa dalam meningkatkan jenjang pendidikannya.

Selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah meluncurkan paket reformasi pendidikan menyeluruh yang dirancang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas. Komponen utama proses reformasi tersebut adalah pelimpahan tanggung jawab pendidikan dasar kepada sekolah-sekolah dan pemerintah di daerah. Reformasi tersebut, bersama-sama dengan peningkatan investasi negara dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghasilkan peningkatan akses pendidikan yang signifikan terutama bagi anak-anak yang paling miskin. Namun peningkatan yang dicapai dalam hal prestasi belajar tidaklah menggembirakan dan anak-anak masih meninggalkan sekolah dengan tingkat keterampilan yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang diminta oleh pasar tenaga kerja. Sama seperti sistem pendidikan lainnya di seluruh dunia, peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah masih terus menjadi tantangan mendasar. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di daerah secara efektif merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dengan baik dan berkualitas ternyata sangat beragam tingkatannya di seluruh Indonesia. Penentuan dimensi tata kelola utama yang mendasari penyampaian layanan pendidikan yang efektif dapat menjadi titik awal untuk mengatasi kelemahan yang ada dan meningkatkan kinerja pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu bagian penting dari pembentukan modal manusia semakin mendapat perhatian dari peneliti dengan kajian empiris berbagai berbagai negara dan antarnegara. Tapi penelitian untuk wilayah regional dalam suatu negara masih relatif lebih sedikit.

## 1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang kemudian dipertegas dalam Qanun Aceh Nomor 2/2008 dan Qanun Aceh Nomor 5/2008, dana pendidikan Aceh berasal dari dana otonomi khusus sebesar 20% dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebesar 30%. Selain itu juga terdapat ketentuan bahwa sebesar 20% dari total belanja dalam anggaran, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, dialokasikan untuk pendidikan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kapasitas fiskal yang besar untuk membangun pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan ketersediaan dana pendidikan di tingkat provinsi. Provinsi Aceh merupakan provinsi yang mendapatkan status otonomi khusus di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Aceh dikenal sebagai serambi Mekah karena mayoritas penduduknya yang beragama muslim dan provinsi yang kental akan aturan-aturan Islam. Provinsi paling barat Indonesia ini tergolong rendah dalam kualitas pendidikannya. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2013, Provinsi Aceh telah mengelola sekitar Rp.27,3 triliun dana tersebut. Namun, meskipun mendapatkan kucuran dana sebesar itu sistem pendidikan di Aceh tergolong kategori tertinggal. Lalu, apa yang membuat pendidikan di Aceh masih tergolong rendah? Hal ini disebabkan karena sebagian kabupaten memang masih memprioritaskan pembangunan fisik tanpa diimbangi peningkatan kualitas pendidik dan kualitas prasarannya. Pada tahun 2013, anggaran di sektor pendidikan Kota Lhokseumawe mencapai Rp 224 miliar. Pada tahun 2014 dinaikkan

jumlahnya menjadi Rp 234 miliar. Namun, alokasi terbesarnya atau sebesar 50% lebih masih dialokasikan untuk pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang lebih diprioritaskan sehingga membuat mutu kualitas pendidikan itu sendiri tidak memadai. Pembangunan fisik pendidikan tidak diimbangi dengan mutu kualitas yang ada membuat Aceh menjadi daerah yang tergolong rendah dalam segi pendidikan. Rendahnya tingkat kelulusan dan kualitas atau mutu guru dibandingkan dengan rata-rata kualitas secara nasional. Kualitas guru di Aceh pada saat ini berada pada peringkat 28 nasional. Sedangkan Kualitas kelulusan siswa Aceh secara umum adalah sebagai berikut (Data Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Kemdiknas 2012):

1. Tingkat kelulusan siswa SMP di Aceh pada 2012 mencapai 99,42% (ranking 21 nasional) dan MTs 99,27% (ranking 26).
2. Kelulusan siswa tingkat SMA jurusan IPA 99,75% (ranking 23) dan SMA jurusan IPS 98,81% (ranking 25 nasional).
3. Tingkat kelulusan siswa MA jurusan IPA 99,78% (ranking 17), MA jurusan IPS 98,21% (ranking 18).
4. Tingkat kelulusan pada jenjang SMK 98,59% (ranking 26) dari 33 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan data analisis terhadap anggaran publik Aceh tahun 2012, banyak pembangunan sektor pendidikan yang masih mementingkan pembangunan infrastruktur tapi meninggalkan pembangunan mutu pendidikan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan termasuk didalamnya pendayagunaan data merasa perlu melakukan suatu kajian

tentang kinerja pendidikan provinsi Aceh. Kajian ini diberi judul “Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Aceh”.

### **1.3. Tujuan**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengukur kinerja dalam dunia pendidikan pemerintah daerah Provinsi Aceh.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Indikator Pendidikan

Berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014, visi Kemdikbud 2014 yang ingin dicapai adalah “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Beradab”. Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan dan kebudayaan adalah layanan yang:

- a. tersedia secara merata di seluruh pelosok Nusantara;
- b. terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- c. berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- d. setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender;
- e. menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
- f. melestarikan dan memperkuat kebudayaan Indonesia.

Untuk mencapai visi Kemdikbud 2014, Misi Kemdikbud 2010—2014 dikemas dalam 6 Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan,
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan,
5. Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan dan
6. Mewujudkan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia Kinerja Pendidikan.

Dalam menghitung kinerja pendidikan hanya digunakan Misi 1-5 yang akan dihitung dengan menggunakan penghitungan indikator pendidikan. Indikator pendidikan merupakan besaran kuantitatif mengenai suatu konsep tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil pendidikan atau dampak dari suatu instrumen kebijakan di bidang pendidikan (Ida K, 2013). Dalam menentukan kinerja pendidikan yang berdasar pada misi Kemdikbud 2014 diperlukan indikator-indikator yang berasal dari data pendidikan maupun data nonpendidikan. Berdasarkan Misi Pendidikan K5 maka indikator pendidikan dikategorikan menjadi Misi K1 sampai Misi K5.

Indikator pendidikan yang digunakan dalam Misi K1 terdiri dari 7 jenis, yaitu:

1. Rasio siswa per kelas (R-S/K),
  - Jika nilai ini melebihi dari standar yang ditentukan berarti akan membuat proses belajar mengajar tidak efisien, tetapi jika nilai indikator ini kurang dari standar yang ditentukan maka berarti proses belajar mengajar tidak efektif.
2. Rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK)
  - Idealnya adalah 1, berarti ruang kelas hanya digunakan sekali, kurang dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang tidak digunakan dan lebih dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Makin tinggi nilainya berarti makin kurang jumlah ruang kelas yang dimiliki.
3. Persentase perpustakaan (%Perpus).
  - Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.
4. Persentase ruang UKS (%RUKS),
  - Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki ruang UKS sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.
5. Persentase ruang komputer (%Rkom),
  - Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki ruang komputer sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.

6. Persentase laboratorium (%Lab), dan
  - Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.
7. Persentase ruang olahraga (%ROR).
  - Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki ruang olahraga sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik

Indikator pendidikan yang digunakan untuk Misi K2 terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. Tingkat pelayanan sekolah (TPS),
  - Makin tinggi TPS berarti makin kecil kesempatan yang diberikan oleh sekolah dalam melayani penduduk usia sekolah atau lulusan. Artinya, sekolah makin sulit dijangkau. Sebaliknya, makin kecil TPS berarti makin besar kesempatan yang diberikan sekolah dalam melayani penduduk usia masuk sekolah atau lulusan. Artinya, sekolah makin mudah dijangkau
2. Daerah terjangkau (DT), dan
  - Makin tinggi DT berarti makin tidak terjangkau oleh siswa. Artinya, sekolah makin tidak bisa dijangkau. Sebaliknya, makin kecil DT berarti sekolah makin mudah dijangkau oleh siswa.
3. Satuan biaya (SB).
  - Makin besar satuan biaya pendidikan berarti semakin baik karena berarti pemerintah daerah semakin perhatian dalam memberikan dana untuk pendidikan.

Indikator pendidikan yang digunakan untuk Misi K3 terdiri dari 11 jenis, yaitu:

1. Persentase siswa baru SD asal TK (%SB-TK),
  - Idealnya adalah 100 persen, artinya semua siswa baru SD berasal dari tamatan TK/RA/BA karena berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa siswa yang berasal dari TK/BA/RA memiliki kemampuan yang lebih baik daripada yang tidak masuk TK/RA/BA (rumah tangga)
2. Persentase guru layak (%GL),
  - Idealnya adalah 100 persen, berarti semua guru memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti makin baik mutu sekolah dipandang dari sudut guru.
3. Rasio siswa per guru (R-S/G),
  - Jika nilainya lebih dari standar berarti makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di suatu daerah. Jika nilainya kurang dari standar berarti terjadi kelebihan guru di wilayah tersebut.
4. Angka lulusan (AL),
  - Idealnya adalah 100 persen berarti semua siswa tingkat tertinggi lulus semuanya. Makin tinggi nilainya, berarti makin baik.
5. Angka mengulang (AU),
  - Idealnya adalah 0 persen berarti semua siswa tidak ada yang mengulang. Makin rendah nilainya, berarti makin baik.
6. Angka putus sekolah (APS),
  - Idealnya adalah 0 persen berarti semua siswa tidak ada yang putus sekolah. Makin rendah nilainya, berarti makin baik.

7. Persentase ruang kelas baik (%RKb),
  - Idealnya adalah 100 persen berarti semua perpustakaan dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah
8. Persentase perpustakaan baik (%Perpusb),
  - Idealnya adalah 100 persen berarti semua sekolah mempunyai ruang perpustakaan dan semuanya dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.
9. Persentase ruang UKS baik (%RUKSb),
  - Idealnya adalah 100 persen berarti semua sekolah mempunyai ruang UKS dan semuanya dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.
10. Persentase ruang komputer baik (%Rkomb),
  - Idealnya adalah 100 persen berarti semua sekolah mempunyai ruang komputer dan semuanya dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah
11. Persentase laboratorium baik (%Labbb).
  - Idealnya adalah 100 persen berarti semua sekolah mempunyai ruang laboratorium dan semuanya dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah

Indikator pendidikan yang digunakan untuk Misi K4 terdiri dari 3 jenis, yaitu :

1. Perbedaan gender (PG),
  - Idealnya adalah 0 persen berarti tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Makin tinggi nilainya berarti

kondisi makin buruk, sebaliknya makin rendah berarti makin baik. Bila angkanya minus berarti perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebaliknya, bila angkanya tak minus berarti laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dengan demikian, nilainya adalah -, 0, dan +

2. Indeks paritas gender (IPG),

- Idealnya adalah 1 berarti tidak ada kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Bila angkanya lebih dari 1 berarti perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebaliknya, bila angkanya kurang dari 1 berarti laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dengan demikian, nilainya adalah <1, 1, dan >1.

3. Persentase siswa swasta (%S-Swt).

- Makin tinggi nilainya berarti makin besar partisipasi sekolah swasta dalam menampung siswa. Belum ada ketentuan berapa nilai idealnya.

Indikator pendidikan yang digunakan untuk Misi K5 terdiri dari 4 jenis, yaitu

1. Angka Partisipasi Murni (APM) atau, Angka Partisipasi Kasar (APK)

- Untuk APM idealnya adalah 100 persen berarti semua siswa bersekolah sesuai usia dan jenjang pendidikan. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan usia resmi di suatu daerah dan di tingkat pendidikan tertentu. Bila nilai APM lebih besar dari 100% karena adanya siswa usia sekolah dari luar daerah bersekolah di daerah tertentu karena lokasi sekolah di daerah kota atau daerah perbatasan.
- Untuk APK. makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu, atau

makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 persen karena terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan.

2. Angka Masukan Murni (AMM) khusus SD dan angka melanjutkan (AM) untuk SMP dan SM,

- Untuk AMM idealnya adalah 100 persen. Makin tinggi AMM berarti makin banyak siswa masuk sekolah yang sesuai dengan usia resmi di suatu daerah.
- Untuk AM idealnya adalah 100 persen yang berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi angkanya makin baik. Bila angkanya lebih dari 100 persen karena ada siswa baru tingkat I yang berasal dari daerah lainnya.

3. Angka bertahan 5 (AB5)/angka bertahan (AB),

- Untuk AB5, makin mendekati 100 persen makin baik berarti siswa dapat bertahan di sekolah
- untuk AB idealnya adalah 100 persen berarti semua siswa dapat bertahan sampai lulus dan tidak ada yang mengulang
- Makin mendekati 100 persen makin baik berarti siswa dapat bertahan di sekolah

4. Rata-rata lama belajar (RLB).

- Idealnya adalah 6 tahun untuk SD dan 3 tahun untuk SMP dan SM berarti semua siswa lulus tepat waktu dan tak ada yang mengulang.

## 2.2 Metodologi

Sumber data pendidikan yang akan digunakan dalam analisis ini merupakan data dari dinas pendidikan kabupaten kota yang ada di wilayah provinsi Aceh yang kemudian digabung menjadi data untuk provinsi Aceh. Selain data pendidikan dari dinas kabupaten/ kota, digunakan juga data nonpendidikan yang bersumber pada Badan Pusat Statistik. Dalam analisis kinerja pendidikan ini, setelah nilai-nilai indikator didapat kemudian nilainya distandarkan dengan standar indikator karena satuannya tidak sama.

Tabel 1  
Standar Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi K5

Misi	No.	Jenis Indikator	Satuan	SD	SMP	SM	Dikdasmen	Penjelasan
Misi K1	1	Rasio S/K	Siswa	32	36	36	-	Permendikbud 23/2013, 24/2007 (SMA) & 40/2008 (SMK)
	2	Rasio K/RK	Kelas	1	1	1	1	Ideal
	3	% Perpustakaan	Persentase	100	100	100	100	Ideal
	4	% Ruang UKS	Persentase	100	100	100	100	Ideal
	5	% R. Komputer	Persentase	100	100	100	100	Ideal
	6	% Tempat Olahraga	Persentase	100	100	100	100	Ideal
	7	% Laboratorium	Persentase	-	100	100	100	Ideal
Misi K2	1	TPS	Siswa	52	81	62	59	Angka nasional 2013/2014
	2	DT	Siswa	183	375	546	258	Angka nasional 2013/2014
	3	SB	Rupiah	828,000	1,014,000	1,428,000	-	SD, SMP, & SM 70% dr BOS 2014
Misi K3	1	% SB TK	Persentase	100	-	-	-	Ideal
	2	% GL	Persentase	100	100	100	100	Ideal
	3	R-S/G	Siswa	16	15	12	-	Angka nasional 2013/2014
	4	AL	Persentase	100	100	100	100	Ideal
	5	AU	Persentase	0	0	0	0	Ideal
	6	APS	Persentase	0	0	0	0	Ideal
	7	% Rkb	Persentase	100	100	100	100	Ideal
	8	% Perpus baik	Persentase	100	100	100	100	Ideal
	9	% RUKS baik	Persentase	100	100	100	100	Ideal
	10	% RKom baik	Persentase	100	100	100	100	Ideal
	11	% Lab baik	Persentase	-	100	100	100	Ideal
Misi K4	1	PG APK	Persentase	0	0	0	0	Ideal
	2	IPG APK	Indeks	1	1	1	1	Ideal
	3	% S-Swt	Persentase	10.00	25.00	50.00	-	Ideal
Misi K5	1	APK	Persentase	100	100	100	100	Ideal
	2	ANM/AM	Persentase	50	100	100	100	Ideal
	3	AB5/AB	Persentase	95	100	100	-	Ideal
	4	RLB	Tahun	6	3	3	-	Ideal

Untuk memperoleh nilai setiap indikator dilaksanakan mengacu pada standar. Dengan demikian, nilai setiap indikator adalah 0-100. Nilai 0 merupakan angka paling rendah dan nilai 100 merupakan angka paling tinggi. Pada umumnya angka indikator yang kurang dari standar menghasilkan nilai

kurang dari 100 sedangkan yang yang sudah melebihi standar bisa terjadi kurang dari 100 atau maksimal 100 tergantung dari jenis indikatornya. Ketercapaian setiap misi pendidikan merupakan rata-rata dari komposit indikator. Ketercapaian pendidikan berdasarkan standar indikator diberikan klasifikasi sama dengan klasifikasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Klasifikasi tersebut ada lima jenis, yaitu paripurna, utama, madya, pratama, dan kurang.

Tabel 2  
Standar Indikator Pendidikan Menurut Jenis Kinerja

No.	Jenis Kinerja	Nilai
1	Paripurna	95.00 ke atas
2	Utama	90.00-94.99
3	Madya	85.00-89.99
4	Pratama	80.00-84.99
5	Kurang	kurang dari 80.00

### BAB III

## HASIL ANALISIS

### 3.1 Keadaan Nonpendidikan

#### a. Administrasi Pemerintahan dan Demografi

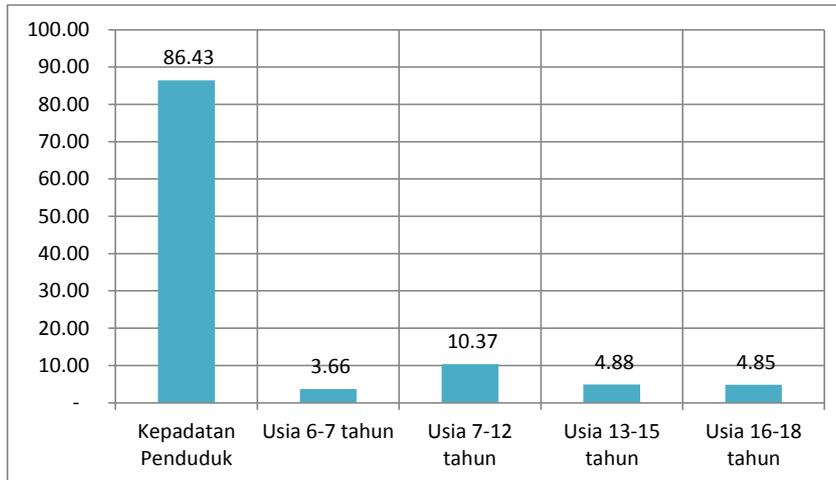
Berdasarkan administrasi pemerintahan di Provinsi Aceh terdapat 23 kabupaten/kota, 289 kecamatan dan 761 desa/kalurahan dengan luas wilayah 56.771 km<sup>2</sup>. Penduduk usia sekolah Dikdasmen adalah usia 6-18 tahun. Usia 6-7 tahun adalah penduduk usia masuk SD, usia 7-12 tahun adalah penduduk usia SD, usia 13-15 tahun adalah penduduk usia SMP, dan usia 16-18 tahun adalah penduduk usia SM.

Tabel 3  
Penduduk, Usia Sekolah, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Usia Sekolah  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014

No.	Variabel	Jumlah	%	Kepadatan
1	Penduduk	4,906,800	100.00	86
2	Penduduk 6-7 tahun	207,676	4.23	4
3	Penduduk 7-12 tahun	588,600	12.00	10
	a. Laki-laki	300,918	51.12	
	b. Perempuan	287,682	48.88	
4	Penduduk 13-15 tahun	276,805	5.64	5
	a. Laki-laki	140,806	50.87	
	b. Perempuan	136,000	49.13	
5	Penduduk 16-18 tahun	275,612	5.62	5
	a. Laki-laki	139,361	50.56	
	b. Perempuan	136,250	49.44	
6	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	56,771		

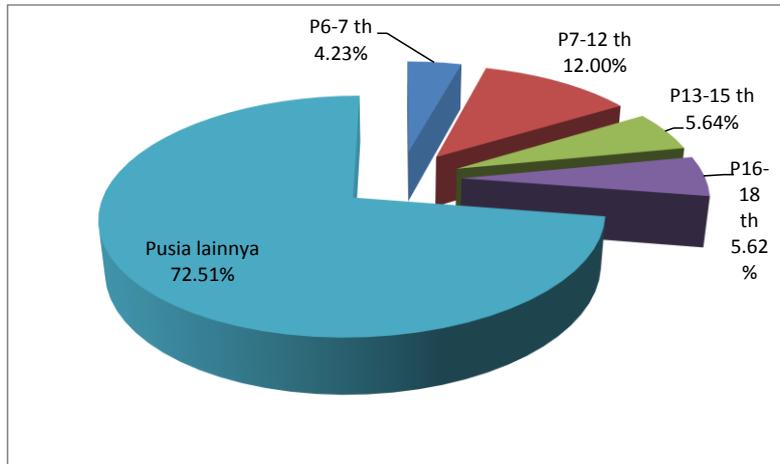
Sumber: Data Nonpendidikan, Isian Profil Dikdasmen Provinsi Aceh 2015

**Grafik 1**  
**Kepadatan Penduduk dan Penduduk Usia Sekolah**  
**Provinsi Aceh**  
**Tahun 2014**



Dalam Tabel 3 dan Grafik 1 ditampilkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Aceh sebesar 4.906.800 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 86 orang per km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk usia masuk SD 6-7 tahun sebesar 207.675 anak dengan kepadatan penduduk usia masuk SD sebesar 4 orang per km<sup>2</sup>. Penduduk usia 7-12 tahun sebesar 588.600 dengan rincian laki-laki sebesar 300.918 dan perempuan 287.682. Kepadatan penduduk usia 7-12 tahun sebesar 10 orang per km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk usia 13-15 sebesar 276.805 dengan rincian laki-laki sebesar 140.806 dan perempuan 136.000 dengan kepadatan usia 13-15 tahun sebesar 5 orang per km<sup>2</sup>. Penduduk usia 16-18 tahun sebesar 275.612 dengan rincian laki-laki sebesar 139.361 dan perempuan 136.250 dengan kepadatan usia 16-18 tahun sebesar 5 orang per km<sup>2</sup>. Jadi Jumlah penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan menengah 7-18 tahun sebesar 1.141.017.

**Grafik 2**  
**Proporsi Penduduk Usia Sekolah**  
**Provinsi Aceh**  
**Tahun 2014**



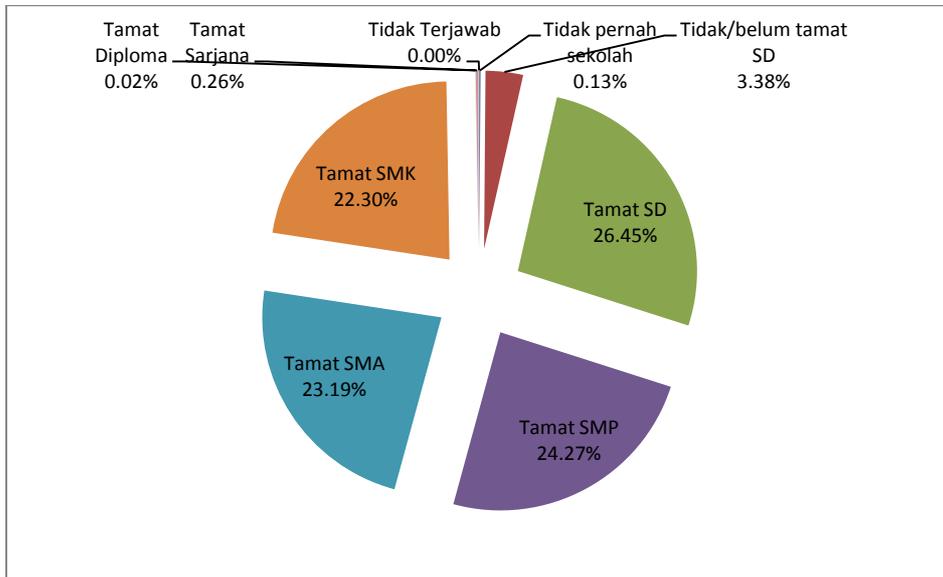
Berdasarkan Tabel 3 dan Grafik 2 diketahui proporsi penduduk usia sekolah terhadap penduduk usia seluruhnya Provinsi Aceh. Proporsi penduduk usia masuk SD atau usia 6-7 tahun sebesar 4,23%, usia 7-12 tahun sebesar 12,00%, usia 13-15 tahun sebesar 5,64%, dan usia 16-18 tahun sebesar 5,62% sedangkan penduduk usia lainnya sebesar 72,51%. Dengan demikian, usia sekolah di pendidikan dasar dan menengah dari usia 7-12 tahun sampai 16-18 tahun sebesar 23,25% atau 1.141.017 orang.

**b. Tingkat Pendidikan Penduduk**

Tingkat pendidikan penduduk dirinci menjadi 9 kelompok, yaitu 1) tidak pernah sekolah, 2) tidak/belum tamat SD, 3) tamat SD, 4) tamat SMP, 5) tamat SMA, 6) tamat SMK, 7) tamat Diploma, 8) tamat Sarjana, dan 9) tidak terjawab. Berdasarkan Grafik 3 diketahui proporsi tingkat pendidikan penduduk Provinsi Aceh tidak pernah sekolah sebesar 106.516 atau 3,16%, tidak/belum tamat SD sebesar 292.370 atau 8,68%, tamat SD sebesar 770.878 atau 22,90%, tamat SMP sebesar 852.644 atau 25,32%, tamat SMA sebesar 903.391 atau 26,83%, tamat SMK sebesar 112.381 atau 3,34%, tamat diploma sebesar 118.940 atau 3,53%, dan tamat sarjana sebesar 209.887 atau 6,23%. Dengan demikian, tingkat pendidikan penduduk terbesar adalah tamat SD dan terkecil adalah tamat diploma. Dengan demikian mayoritas pendidikan penduduk Provinsi Aceh adalah tamat SD.

Bila dilihat tingkat kepandaian membaca dan menulis maka penduduk yang dapat membaca dan menulis sebesar 3.714.846 orang atau 97,11%, sedangkan yang buta huruf sebesar 110.554 orang atau 2,89%.

Grafik 3  
Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014



Penduduk yang dapat membaca/menulis dirinci menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka adalah mereka yang pernah maupun tidak pernah bekerja. Bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja Provinsi Aceh sebesar 3.367.007 orang. Angkatan kerja sebesar 2.123.312 orang atau 63,06% yang bekerja sebanyak 1.931.823 orang atau 57,38% dan pengangguran terbuka sebanyak 191.489 orang atau 5,69%. Bukan angkatan kerja sebesar 1.243.695 orang atau 36,94% dimana sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja adalah mengurus rumah tangga sebesar 632.852 orang atau 18,80%.

### c. Sosial Budaya dan Agama

Kondisi sosial budaya dapat dilihat dari keagamaan dan kesehatan. Berdasarkan keagamaan maka terdapat enam jenis agama yang diakui, yaitu 1) Islam, 2) Protestan, 3) Katholik, 4) Hindu, 5) Budha, dan 6) Khonghucu. Penduduk di Provinsi Aceh yang beragama Islam sebesar 4.855.313 orang atau 98,95%, beragama Protestan sebesar 38.765 orang atau 0,79%, beragama Katolik sebesar 7.851 orang atau 0,16%, beragama Hindu sebesar 491 orang atau 0,01%, beragama Budha sebesar 4.416 orang atau 0,09%, dan tidak ada yang beragama Khonghucu. Dengan demikian, mayoritas penduduk beragama Islam karena yang terbesar dan agama Hindu yang terkecil.

Berdasarkan kesehatan maka di Provinsi Aceh terdapat sejumlah 50 rumah sakit, 334 puskesmas dan 964 puskesmas pembantu.

### 3.2 Keadaan Pendidikan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahasan tentang keadaan pendidikan dirinci menjadi tiga jenis, yaitu 1) data pendidikan, 2) indikator pendidikan, dan 3) analisis indikator pendidikan. Ketiga jenis bahasan tersebut diberlakukan untuk tiga jenjang pendidikan, yaitu 1) SD yang terdiri dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), SDLB, dan Paket A, 2) SMP yang terdiri dari SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), SMPLB, dan Paket B, dan 3) SM yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), SMALB, dan Paket C. Kemudian ketiga jenjang tersebut dijumlahkan menjadi rangkuman dikdasmen.

Data pendidikan yang dibahas terdiri dari tiga jenjang dan 13 satuan pendidikan, yaitu 1) SD, 2) MI, 3) SDLB, 4) Paket A, 5) SMP, 6) MTs, 7) SMPLB, 8) Paket B, 9) SMA, 10) MA, 11) SMK, 12) SMALB, dan 13) Paket C. Dalam bahasan berikutnya hanya dirinci menurut jenjang pendidikan, yaitu jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SM serta rangkuman dikdasmen.

#### 1. Data Pendidikan

Data dikdasmen yang disajikan diuraikan menjadi 14 variabel data pada tahun 2014/2015. Sebanyak 8 variabel pertama adalah prasarana yang terdiri dari sekolah, rombongan belajar (kelas), ruang kelas, perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga, dan laboratorium, sedangkan 6

variabel berikutnya adalah sumber daya manusia seperti siswa baru, siswa, lulusan, guru, mengulang, dan putus sekolah.

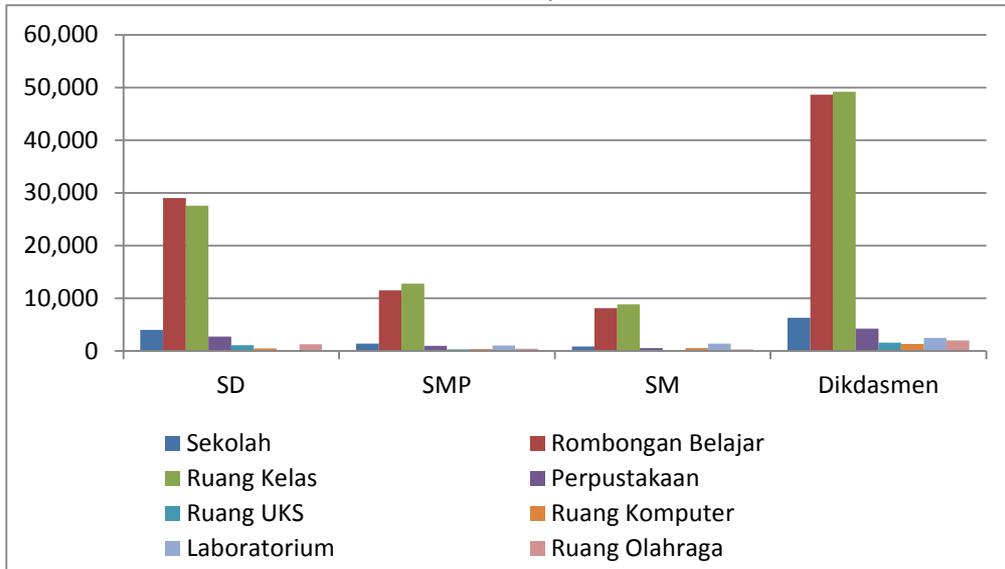
Berdasarkan Tabel 4 di Provinsi Aceh terdapat jumlah sekolah dikdasmen sebesar 6.285 buah dengan sekolah terbesar adalah jenjang SD sebesar 4.006. Jumlah SMP di Provinsi Aceh sebesar 1.415 dan jumlah sekolah menengah (SM) sebesar 864. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan makin sedikit jumlah satuan pendidikannya.

Tabel 4  
Data Prasarana Dikdasmen  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Sekolah	4,006	1,415	864	6,285
2	Rombongan Belajar	29,032	11,479	8,115	48,626
3	Ruang Kelas	27,534	12,798	8,845	49,177
4	Perpustakaan	2,734	956	556	4,246
5	Ruang UKS	1,092	297	198	1,587
6	Ruang Komputer	453	330	564	1,347
7	Ruang Olahraga	1,282	417	284	1,983
8	Laboratorium	-	1,045	1,410	2,455

Sumber: Rangkuman Data, Isian Profil Dikdasmen Provinsi Aceh 2015

Grafik 4  
Prasarana Sekolah Dikdasmen  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015



Tabel 5  
Data Sumber Daya Manusia Dikdasmen  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

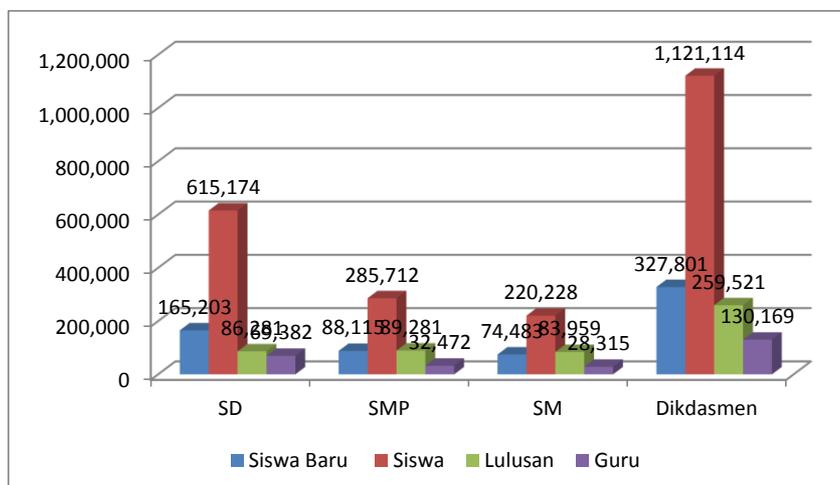
No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Siswa Baru	165,203	88,115	74,483	327,801
2	Siswa	615,174	285,712	220,228	1,121,114
3	Lulusan	86,281	89,281	83,959	259,521
4	Guru	69,382	32,472	28,315	130,169
5	Mengulang	9,040	1,254	792	11,086
6	Putus Sekolah	343	1,085	867	2,295

Sumber: Rangkuman Data, Isian Profil Dikdasmen Provinsi Aceh 2015

Pada Tabel 4 dan 5 diketahui bahwa untuk menampung siswa jenjang SD sebesar 615.174, tersedia 4.006 sekolah dan 27.534 ruang kelas serta rombongan belajar sejumlah 29.032 sedangkan untuk menampung siswa jenjang SMP sebesar 285.712 orang, tersedia 1.415 sekolah dan 12.798 ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar sebesar 11.479. Untuk menampung siswa jenjang SM sebesar 220.228 orang, tersedia sebesar 864 sekolah dan 8.845 ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar sebesar 8.115. Dengan demikian, untuk satuan pendidikan dasar dan menengah telah menampung

sebanyak 1.121.114 siswa di 6.285 sekolah dan 49.117 ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar sebesar 48.626.

Grafik 5  
Sumber Daya Manusia Dikdasmen  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015



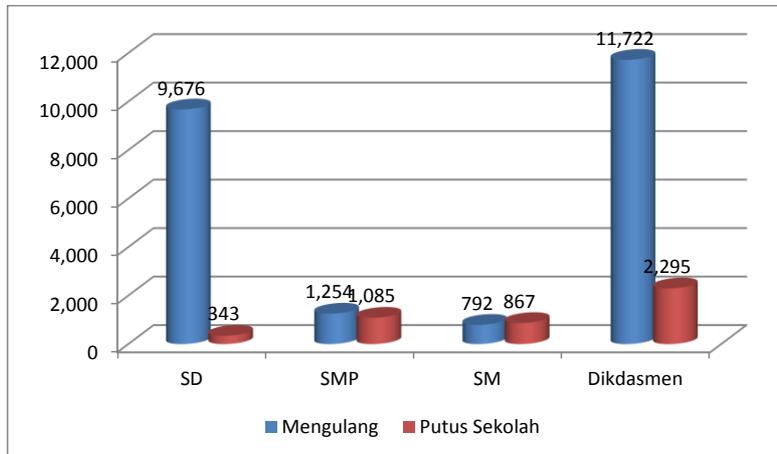
Tabel 6  
Kekurangan dan kelebihan Prasarana Dikdasmen  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	RK	1,498	-1,319	-730	-551
2	Perpustakaan	1,272	459	308	2,039
3	Ruang UKS	2,914	1,118	666	4,698
4	Ruang Komputer	3,553	1,085	300	4,938
5	Ruang Olahraga	2,724	998	580	4,302
6	Laboratorium	-	370	2,910	3,280

Pada Tabel 4 diketahui bahwa ruang kelas jenjang SD lebih kecil jika dibandingkan dengan rombongan belajar yang ada sedangkan jenjang SMP dan SM dengan kondisi sebaliknya. Hal ini berarti bahwa untuk jenjang SD masih kekurangan ruang kelas untuk proses belajar mengajar sedangkan untuk jenjang SMP dan SM kelebihan ruang kelas. Seperti disajikan pada Tabel 6, untuk jenjang SD kekurangan 1.498 ruang, jenjang SMP kelebihan 1.319 ruang kelas, dan jenjang SM kelebihan 730 ruang, sehingga untuk dikdasmen kelebihan 551 ruang. Agar pelayanan pendidikan untuk jenjang SD dapat meningkat maka diperlukan penambahan ruang kelas sehingga Misi K1 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Strategi Kemdikbud 2010-2014. Sebaliknya, jenjang pendidikan SMP dan SM yang kelebihan ruang kelas supaya tidak dibiarkan kosong dan hendaknya dapat dimanfaatkan oleh semua anak yang belum bersekolah agar bersekolah, sehingga Misi K1 ketersediaan layanan pendidikan dapat tercapai.

Hal yang sama untuk perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga, dan laboratorium. Bila setiap sekolah harus memiliki perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga, dan laboratorium (khusus SM sebanyak 5 jenis laboratorium) maka di semua jenjang pendidikan masih terdapat kekurangan perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga, dan laboratorium. Berdasarkan pada Tabel 6. maka untuk jenjang SD Provinsi Aceh masih kekurangan 1.272 perpustakaan, jenjang SMP kekurangan 459 perpustakaan, dan jenjang SM kekurangan 308 perpustakaan, sehingga dikdasmen masih kekurangan 2.039 perpustakaan. Demikian juga dengan ruang UKS, jenjang SD kekurangan 2.914 ruang UKS, jenjang SMP kekurangan 1.118 ruang UKS, dan jenjang SM kekurangan 666 ruang UKS, sehingga dikdasmen kekurangan 4.698 ruang UKS. Hal yang sama dengan ruang komputer, jenjang SD kekurangan 3.553 ruang komputer, jenjang SMP kekurangan 1.085 ruang komputer, dan jenjang SM kekurangan 300 ruang komputer, sehingga dikdasmen kekurangan 4.938 ruang komputer. Untuk tempat olahraga, jenjang SD masih kekurangan 2.724 ruang, jenjang SMP masih kekurangan 998 ruang, dan jenjang SM kekurangan 580 ruang, sehingga dikdasmen kekurangan 4.302 ruang. Untuk laboratorium, jenjang SMP masih kekurangan 370 laboratorium dan jenjang SM kekurangan 2.910 laboratorium sehingga dikdasmen kekurangan 3.280 laboratorium.

Grafik 6  
Mengulang dan Putus Sekolah Dikdasmen  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015



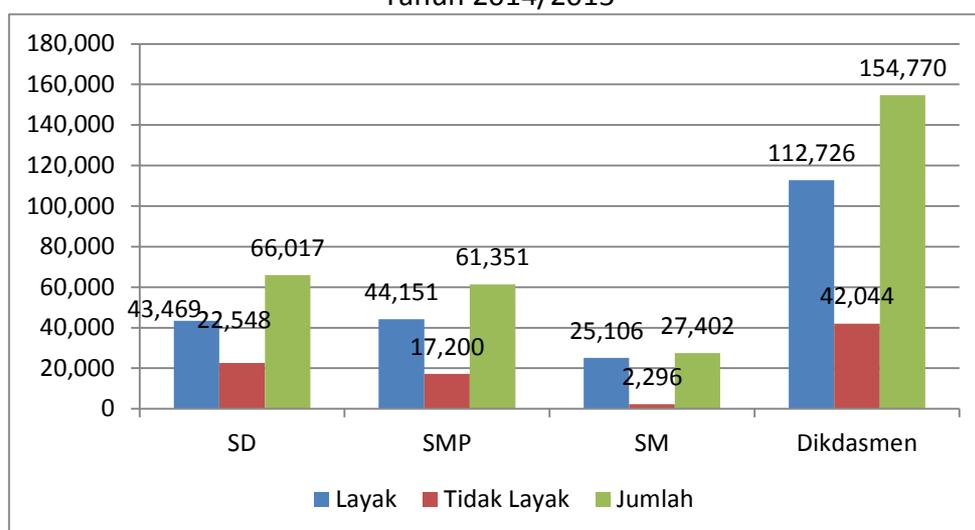
Jumlah siswa mengulang di Provinsi Aceh pada jenjang SD sebesar masih cukup besar dibandingkan dengan jenjang lain. Siswa SD yang mengulang sebanyak 9.676 orang sedangkan jenjang SMP sebesar 1.254 dan jenjang SM sebesar 11.722. Jumlah siswa yang putus sekolah di jenjang SD lebih kecil jika dibandingkan pada jenjang lain. Siswa SD yang mengalami putus sekolah sebesar 343 orang sedangkan putus sekolah di jenjang SMP sebesar 1.085 dan SM sebesar 867. Jadi total siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mengalami putus sekolah sebanyak 2.295 orang. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka mengulang yang besar pada jenjang SD harus segera ditanggulangi melalui program remedial. Hal yang sama untuk putus sekolah yang besar pada jenjang SMP hendaknya ditanggulangi melalui program retrieval sehingga anak yang putus sekolah bisa kembali ke sekolah atau dapat masuk di program Paket A, B dan C dalam rangka peningkatan mutu di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 7  
Guru menurut Kelayakan Mengajar  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Layak	43,469	44,151	25,106	112,726
2	Tidak Layak	22,548	17,200	2,296	42,044
	Jumlah	66,017	61,351	27,402	154,770
1	% Layak	65.85	71.96	91.62	72.83
2	% Tidak Layak	34.15	28.04	8.38	27.17

Sumber: Rangkuman Data, Isian Profil Dikdasmen Provinsi Aceh 2015

Grafik 7  
Guru menurut Kelayakan Mengajar  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015



Dalam membuat analisis kelayakan mengajar guru menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005). Guru layak mengajar di tingkat SD, SMP dan SM adalah yang berijazah Sarjana atau Diploma IV dan yang lebih tinggi. Jumlah guru menurut kelayakan mengajar dapat dilihat pada Tabel 7 dan Grafik 7. Guru SD yang layak mengajar sebesar 65,85%, guru SMP yang layak mengajar sebesar 71,96% dan guru SM yang layak mengajar sebesar 91,62%. Jumlah guru di Provinsi Aceh yang layak mengajar di jenjang SD secara persentase lebih sedikit daripada jenjang SMP dan SMP. Jadi terlihat bahwa semakin tinggi jenjang satuan pendidikan persentase guru yang layak mengajar

semakin besar persentasenya. Kecilnya guru layak di jenjang SD karena adanya peningkatan kualifikasi bahwa guru SD yang layak sebelumnya adalah mereka yang memiliki ijazah Diploma II. Karena di jenjang SD dan SMP masih banyak guru yang belum layak mengajar maka diperlukan upaya lebih lanjut dalam rangka penyetaraan guru agar sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada UU No. 14/2005.

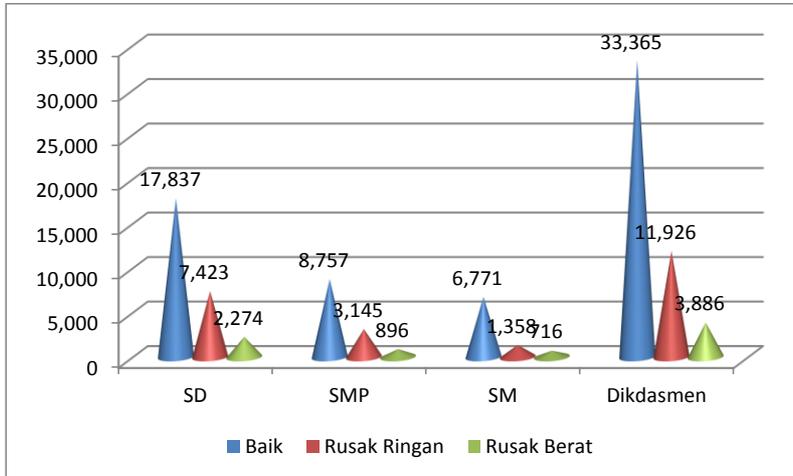
Ruang kelas sebagai prasarana penting sekolah terbagi dalam tiga kondisi, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. Jumlah ruang kelas menurut kondisi terdapat pada Tabel 8 dan Grafik 8. Berdasarkan ruang kelas di Provinsi Aceh, ternyata hampir semua jenjang pendidikan memiliki ruang kelas yang rusak berat. Jenjang SD memiliki jumlah ruang kelas yang rusak ringan dan rusak berat yang masih cukup banyak sebesar 35,22 atau sebanyak 9.697 rusak. Demikian juga jenjang SMP dan SM. Masih ada 31,58% atau 4.041 ruang kelas di jenjang SMP yang memiliki kondisi yang rusak ringan dan rusak berat, sedangkan untuk jenjang SM masih ada 23,45% atau 2.074 ruang kelas yang dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Oleh karena itu diharapkan Provinsi Aceh segera melakukan program rehabilitasi untuk jenjang SD, SMP dan SM sehingga kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Aceh semakin meningkat. Program rehabilitasi diutamakan pada ruang kelas yang rusak berat agar bisa segera digunakan untuk proses belajar mengajar. Jika digabungkan semua jenjang terlihat bahwa ruang kelas yang rusak berat masih cukup besar karena mencapai 3.886 ruang.

Tabel 8  
Ruang Kelas Milik menurut Kondisi  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Baik	2,380	961	722	4,063
2	Rusak Ringan	954	143	51	1,148
3	Rusak Berat	233	50	16	299
	Jumlah	3,567	1,154	789	5,510
1	% Baik	66.72	83.28	91.51	73.74
2	% Rusak Ringan	26.75	12.39	6.46	20.83
3	% Rusak Berat	6.53	4.33	2.03	5.43

Sumber: SD, SMP, dan SM, Isian Profil Dikdasmen Provinsi Aceh 2015

**Grafik 8**  
**Ruang Kelas Menurut Kondisi**  
**Provinsi Aceh**  
**Tahun 2014/2015**



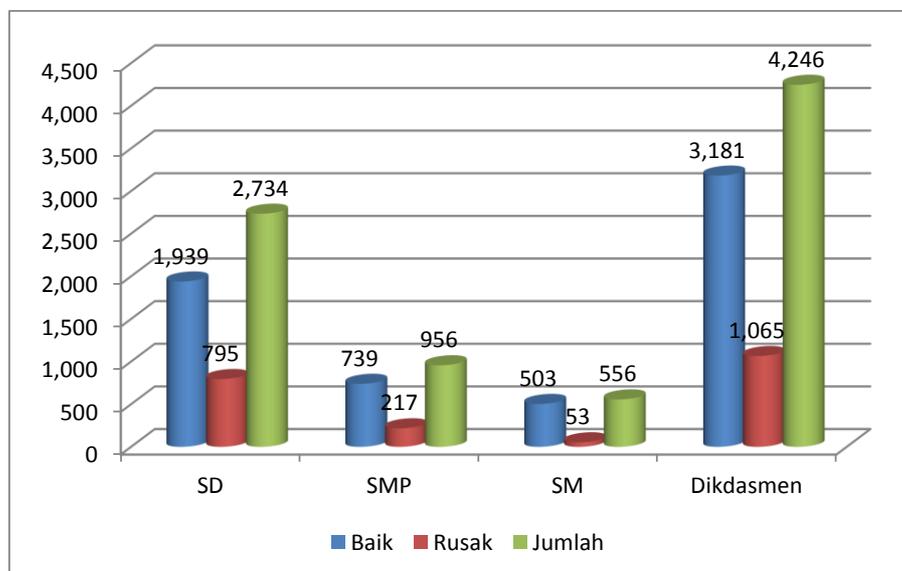
Prasarana sekolah yang juga penting adalah perpustakaan terbagi dalam kondisi baik dan rusak terdapat pada Tabel 9 dan Grafik 9. Ruang perpustakaan di jenjang SD masih banyak dalam kondisi rusak. Ada sebanyak 795 ruang atau 29,08%. Untuk jenjang SMP masih ada 22,70% atau 217 ruang yang dalam kondisi rusak. Kondisi ruang perpustakaan untuk jenjang SM cukup baik karena sudah 90,47% yang dalam kondisi baik. Hanya 8,09% yang berada dalam kondisi rusak.

**Tabel 9**  
**Perpustakaan menurut Kondisi**  
**Provinsi Aceh**  
**Tahun 2014/2015**

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Baik	1,939	739	503	3,181
2	Rusak	795	217	53	1,065
	Jumlah	2,734	956	556	4,246
1	% Baik	70.92	77.30	90.47	74.92
2	% Rusak	29.08	22.70	9.53	25.08

Sumber: SD, SMP, dan SM, Isian Profil Dikdasmen Provinsi Aceh 2015

Grafik 9  
Perpustakaan Menurut Kondisi  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015



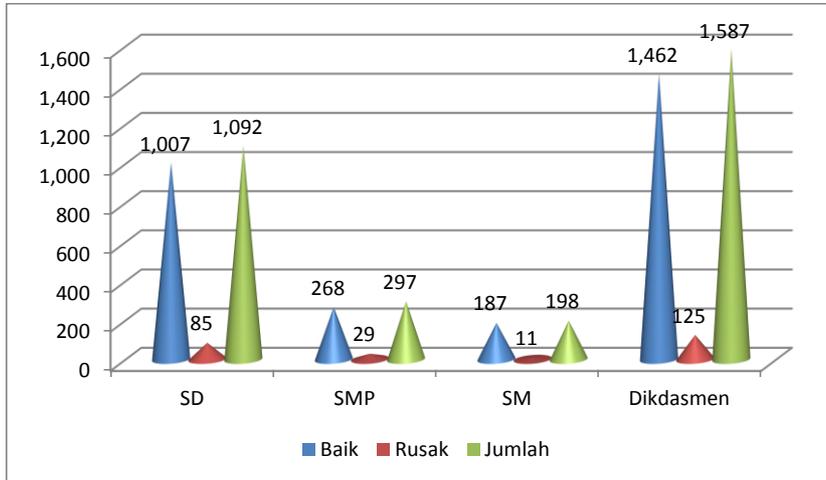
Prasarana sekolah yang juga diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23, Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (Permendikbud 23/2013) adalah ruang UKS. Ruang UKS di semua jenjang sudah cukup baik. Lebih dari 90% ruang UKS di Provinsi Aceh berada dalam kondisi baik. Berdasarkan tabel 10 dan Grafik 10 di jenjang SD hanya ada 7,78% ruang UKS yang dalam kondisi rusak. Untuk jenjang SMP 9,76% dalam kondisi rusak sedangkan jenjang SM hanya ada 5,56% dalam kondisi rusak. Secara keseluruhan hanya 7,88% ruang UKS di Provinsi Aceh yang dalam kondisi rusak.

Tabel 10  
Ruang Usaha Kesehatan Sekolah menurut Kondisi  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Baik	1,007	268	187	1,462
2	Rusak	85	29	11	125
	Jumlah	1,092	297	198	1,587
1	% Baik	92.22	90.24	94.44	92.12
2	% Rusak	7.78	9.76	5.56	7.88

Sumber: SD, SMP, dan SM, Isian Profil Dikdasmen Provinsi Aceh 2015

Grafik 10  
Ruang UKS Menurut Kondisi  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015



Tabel 11  
Ruang Komputer Menurut Kondisi  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

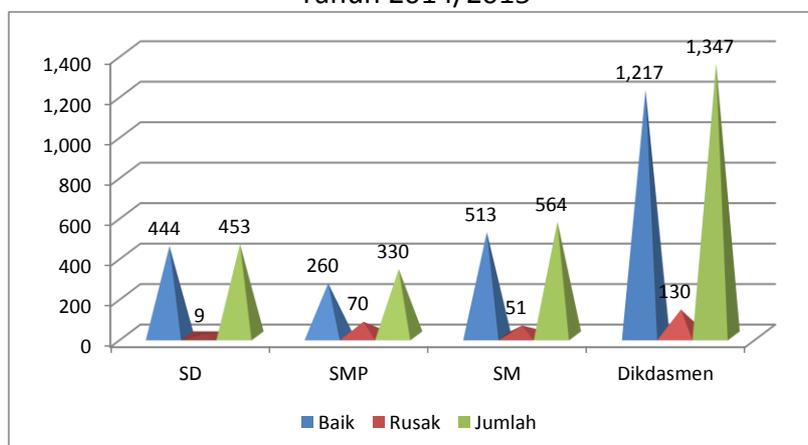
No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Baik	444	260	513	1,217
2	Rusak	9	70	51	130
	Jumlah	453	330	564	1,347
1	% Baik	98.01	78.79	90.96	90.35
2	% Rusak	1.99	21.21	9.04	9.65

Sumber: SD, SMP, dan SM, Isian Profil Dikdasmen Provinsi Aceh 2015

Prasarana sekolah yang juga diperlukan sesuai dengan Permendikbud 23/2013 adalah ruang komputer yang terbagi dalam kondisi baik dan rusak yang terdapat pada Tabel 11 dan Grafik 11. Ruang komputer di jenjang SD dan SM sudah bagus karena lebih dari 90% yang dalam kondisi baik. Khusus jenjang SMP masih ada 21,21% yang dalam kondisi rusak.

Grafik 11

Ruang Komputer Menurut Kondisi  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

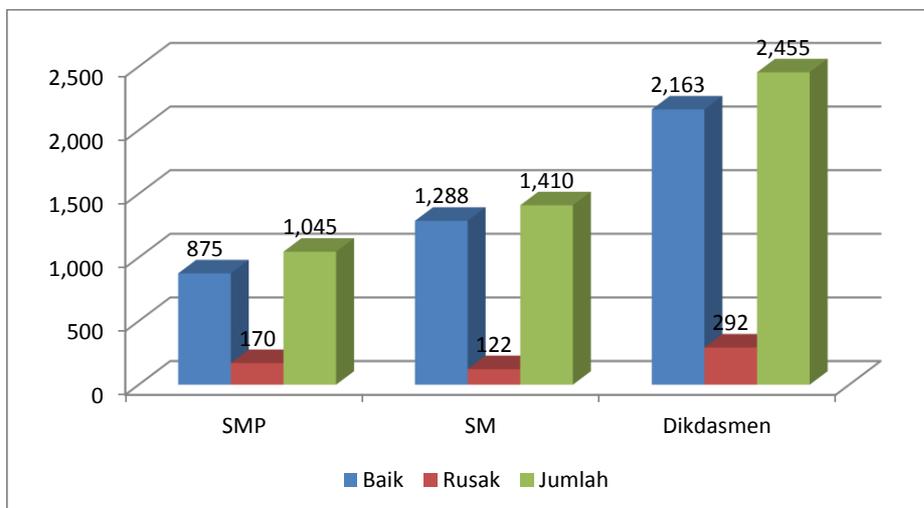


Prasarana sekolah yang juga diperlukan sesuai dengan Permendikbud No. 23 tahun 2013 adalah laboratorium. Kondisi ruang laboratorium yang ada di Provinsi Aceh sebagian besar dalam kondisi baik. Akan tetapi untuk SMP masih 16,27% yang dalam kondisi rusak, sedangkan untuk jenjang SM hanya 8,65% yang dalam kondisi rusak. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 12 dan Grafik 12.

Tabel 12  
Laboratorium Menurut Kondisi  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

No.	Variabel	SMP	SM	Dikdasmen
1	Baik	875	1,288	2,163
2	Rusak	170	122	292
	Jumlah	1,045	1,410	2,455
1	% Baik	83.73	91.35	88.11
2	% Rusak	16.27	8.65	11.89

Grafik 12  
Laboratorium Menurut Kondisi  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015



## 2. Indikator Pendidikan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya maka indikator pendidikan yang digunakan disesuaikan dengan misi pendidikan 5K.

### a. Ketersediaan Layanan Pendidikan: Misi K1

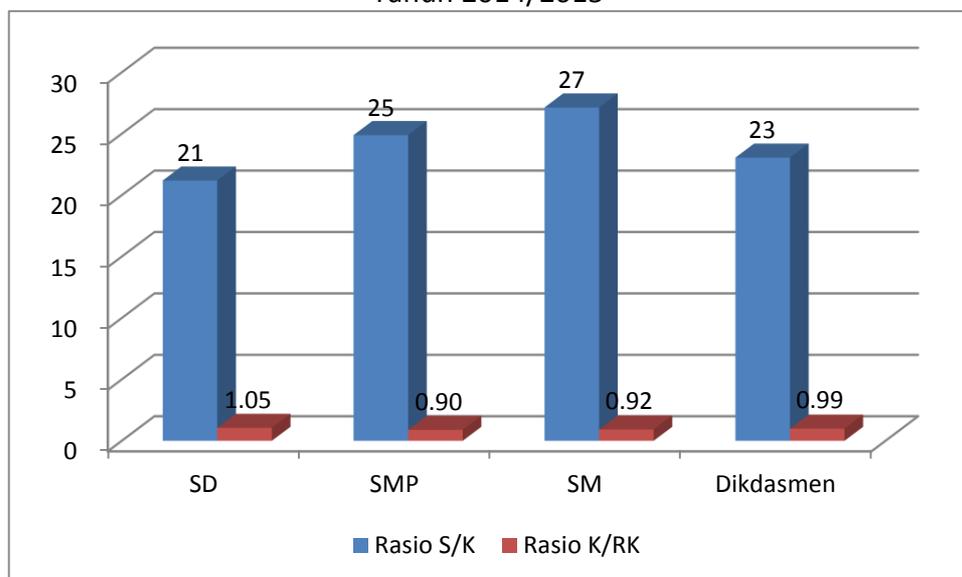
Untuk mengetahui ketersediaan layanan pendidikan digunakan 7 indikator pendidikan yang terkait dengan prasarana pendidikan, yaitu dua jenis rasio seperti R-S/K, dan R-K/RK serta lima jenis prasarana seperti %Perpus, %RUKS, %Rkom, %TOR, dan %Lab.

Tabel 13  
Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan Misi K1  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

No.	Jenis Indikator	Satuan	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)	siswa	21	25	27	23
2	Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)	ruang kelas	1.05	0.90	0.92	0.99
3	% Perpustakaan	persentase	68.25	67.56	64.35	67.56
4	% Ruang UKS	persentase	27.26	20.99	22.92	25.25
5	% Ruang Komputer	persentase	11.31	23.32	65.28	21.43
6	% Tempat Olahraga	persentase	32.00	29.47	32.87	31.55
7	% Laboratorium	persentase	-	73.85	32.64	42.81

Berdasarkan Permendiknas No. 23 tahun 2013, R-S/K jenjang SD sebesar 32, sedangkan jenjang SMP dan jenjang SM sebesar 36. Pada kenyataannya, R-S/K di Provinsi Aceh untuk jenjang SD sebesar 21, untuk jenjang SMP sebesar 25, dan untuk jenjang SM sebesar 27 sehingga rata-rata dikdasmen sebesar 23 siswa. Jenjang SD menggunakan sistem kelas sehingga terlihat perbedaannya dengan jenjang SMP maupun jenjang SM. Dengan demikian, efisiensi penggunaan kelas di jenjang SD sebesar 66,22% atau belum maksimal, penggunaan kelas untuk jenjang SMP sebesar 69,14% atau belum maksimal, sedangkan jenjang SM sebesar 75,38% atau belum maksimal. Hal ini menunjukkan makin tinggi jenjang sekolah makin efisien. Akan tetapi karena rasio S/K untuk semua jenjang masih kurang dari ketentuan yang ada di Permendiknas No. 23 tahun 2013 maka perlu dilihat kembali mengapa penggunaan kelas belum efisien karena masih jauh dari angka 100%. Ketidakefisienan bisa terjadi karena memang penduduk usia sekolah memang sedikit atau memang masih banyak siswa usia tersebut tidak bersekolah. Hal ini bisa diperbandingkan dengan APK dari masing-masing jenjang. Kalau APK sudah mencapai angka 100% maka kecilnya R-S/K terjadi karena kelas yang disiapkan untuk sekolah sudah cukup banyak. Oleh karena itu seharusnya jumlah kelas (rombongan belajar) disesuaikan dengan ketentuan sehingga jumlah guru bisa lebih diefisienkan.

Grafik 13  
Rasio Pendidikan Dikdasmen  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015



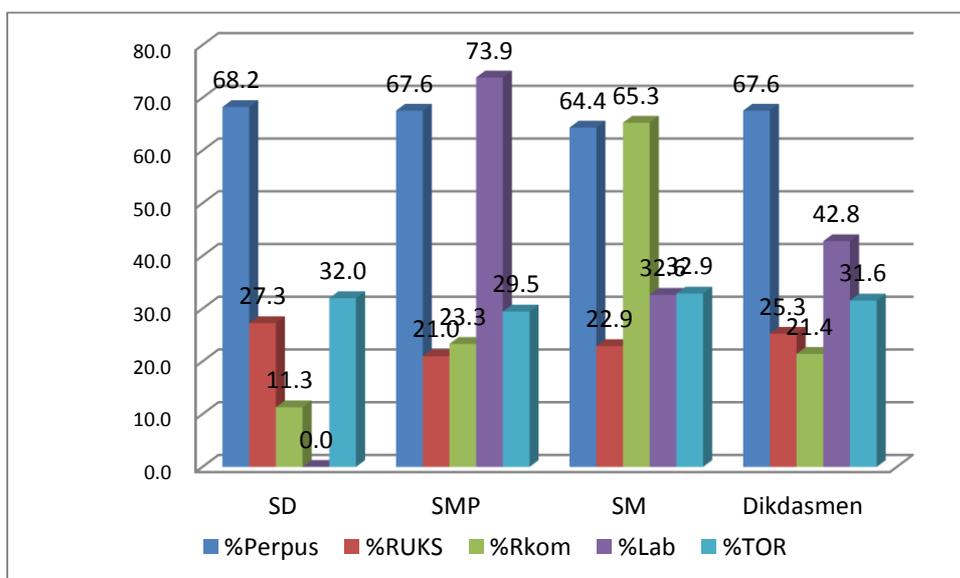
R-K/RK idealnya adalah 1. R-K/RK di Provinsi Aceh di jenjang SD lebih dari 1 karena masih banyak sekolah yang menggunakan 1 ruang kelas untuk kelas 1 dan kelas 2 karena untuk kelas 1 dan 2 jam pelajaran yang diberikan masih sedikit. R-K/RK untuk jenjang SMP dan SM ternyata kurang dari angka 1. Hal ini mengakibatkan banyak ruang kelas yang tidak terpakai. Untuk jenjang SD terdapat 5,44% ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar, sedangkan untuk jenjang SMP terdapat 10,31% ruang kelas tidak dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dan untuk jenjang SM ada 8,25% ruang kelas yang belum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Khusus jenjang SMP dan SM, adanya ruang kelas yang belum digunakan untuk proses belajar mengajar dapat digunakan untuk menampung siswa agar partisipasi siswa bertambah sehingga APK jenjang SM akan meningkat. Jika angka partisipasi sudah mencapai 100% maka kelebihan ruang kelas bisa digunakan sebagai perpustakaan atau laboratorium atau ruang lain untuk menunjang proses belajar mengajar.

%Perpustakaan idealnya adalah 100%. Pada kenyataannya, %Perpustakaan di Provinsi Aceh untuk semua jenjang belum mencapai 100% bahkan masih berkisar diangka 60%. %perpustakaan dijenjang SD sebesar 68,2%, SMP sebesar 67,6% dan SM sebesar 64,4%. Jadi masih banyak sekolah-sekolah yang belum mempunyai ruang perpustakaan. Oleh karena

itu pemerintah Provinsi Aceh hendaknya membuat program untuk membangun ruang perpustakaan atau memanfaatkan ruang kelas yang tidak dipergunakan untuk ruang perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu media atau tempat belajar yang sangat penting bagi para siswa. Oleh karena pemenuhan ruang perpustakaan dan koleksinya sangat diperlukan. Pemerintah dalam hal ini Provinsi Aceh hendaknya memperhatikan hal tersebut. Jadi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah baru ada 67,6% yang memiliki ruang perpustakaan yang berarti masih ada 32,4% sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan.

%RUKS idealnya adalah 100%. Berdasarkan tabel 13 terlihat bahwa %ruang UKS untuk semua jenjang masih sangat kecil. Untuk jenjang SD baru ada 27,3% sekolah yang memiliki ruang UKS, jenjang SMP baru ada 21,0% yang memiliki ruang UKS dan untuk jenjang SM baru ada 22,9% yang memiliki ruang UKS. Jadi secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah baru ada 25,3% sekolah yang baru memiliki ruang UKS. Masih ada 74,7% sekolah yang memerlukan ruang UKS. Jadi perlu adanya program pembangunan ruang UKS yang cukup banyak karena masih banyak sekolah yang belum memiliki ruang UKS. Hal ini menjadi PR yang cukup besar bagi pemerintah Provinsi Aceh.

Grafik 14  
 Persentase Prasarana Dikdasmen  
 Provinsi Aceh  
 Tahun 2014/2015



Idealnya setiap satuan pendidikan memiliki ruang komputer. Sehingga nilai dari %RKom idealnya adalah 100%. Pada kenyataannya, %RKom di Provinsi Aceh masih sangat kecil. Secara total pendidikan dasar dan menengah hanya 21,4% yang mempunyai ruang komputer. Jenjang SD hanya 11,3% yang mempunyai ruang komputer, jenjang SMP hanya 23,3% yang mempunyai ruang komputer sedangkan jenjang SM ada 65,3% yang mempunyai ruang komputer. Jadi masih banyak kebutuhan pembangunan ruang komputer atau alih fungsi dari ruang kelas yang tidak terpakai untuk ruang komputer dan pembelian komputer untuk memenuhi ketersediaan sarana komputer untuk satuan pendidikan. Untuk jenjang SD terdapat 88,7% sekolah yang belum memiliki ruang komputer, jenjang SMP terdapat 76,7% sekolah yang belum memiliki ruang komputer, dan jenjang SM terdapat 34,7% sekolah belum memiliki ruang komputer, sehingga secara keseluruhan pendidikan dasar dan menengah yang belum mempunyai ruang komputer sebesar 74,7%.

Tempat Olahraga juga diperlukan guna menunjang proses belajar mengajar. %TOR idealnya adalah 100%. Jumlah sekolah yang memiliki tempat olahraga di Provinsi Aceh masih sedikit. Lebih dari 60% sekolah di Provinsi Aceh telah memiliki sarana untuk olahraga. %TOR di Provinsi Aceh untuk jenjang SD adalah 32,0%, SMP 29,5% dan jenjang SM 32,9%. Secara keseluruhan untuk pendidikan dasar dan menengah baru 31,6% sekolah yang mempunyai sarana olahraga. Jadi masih ada 68,4% sekolah yang memiliki sarana olahraga. Masih banyak sekolah yang menggunakan lapangan desa untuk tempat olahraga siswa.

%Lab hanya ada di jenjang SMP dan SM yang idealnya adalah 100%. %Lab jenjang SMP di Provinsi Aceh sebesar 73,9% lebih besar daripada %Lab jenjang SM sebesar 32,6%, sehingga dikdasmen yang masih kekurangan %Lab sebesar 59,25 %. %Lab untuk jenjang SM cenderung lebih kecil daripada jenjang SMP karena untuk jenjang SM untuk setiap satuan pendidikan SMA idealnya memiliki 5 laboratorium yaitu laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa dan Multimedia.

#### b. Keterjangkauan Layanan Pendidikan: Misi K2

Karena keterbatasan data biaya pendidikan maka untuk mengetahui keterjangkauan layanan hanya 2 indikator yang digunakan yaitu indikator sekolah atau TPS dan indikator daerah atau DT yang ditampilkan pada Tabel 14. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) untuk jenjang SD 43, jenjang SMP 45 dan Jenjang SM 66. Tingkat Pelayanan Sekolah untuk semua jenjang masih dibawah standar yang ditentukan dimana standar untuk SD adalah 45, untuk

SMP 88 dan untuk SM 67. Hal ini berarti bahwa kesempatan untuk bersekolah bagi penduduk Provinsi Aceh sangat besar karena cukup banyak disediakan satuan pendidikan untuk menampung penduduk yang akan bersekolah. Dalam tabel 14 terlihat bahwa daerah terjangkau (DT) untuk Provinsi Aceh di jenjang SD sebesar 147, jenjang SMP sebesar 196 dan jenjang SM sebesar 319. Standar yang digunakan untuk melihat daerah keterjangkauan adalah 166 untuk SD, 364 untuk SMP dan 319 untuk SM. Berdasarkan standar yang digunakan tersebut maka terlihat bahwa Provinsi Aceh sudah cukup menyediakan dalam menyediakan sekolah untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah karena DT Provinsi Aceh masih dibawah standar yang digunakan.

Tabel 14  
Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan Misi K2  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

No.	Jenis Indikator	Satuan	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)	siswa	43	45	66	51
2	Daerah Terjangkau (DT)	siswa	147	196	319	182

c. Kualitas Layanan Pendidikan: K3

Untuk dapat melihat kualitas layanan pendidikan maka digunakan 11 indikator, enam indikator berasal dari sumber daya manusia dan lima indikator berasal dari prasarana pendidikan. Kualitas pendidikan dilihat dari sumber daya manusia terdiri dari masukan, yaitu %SB TK, dari sudut guru, yaitu %GL dan R-S/G, dari sudut siswa itu sendiri melalui AL, AU, dan APS. Kualitas pendidikan lainnya dapat dilihat dari prasarana yang dimiliki, yaitu %RKb, %Perpusb, %RUKSb, %Rkomb, dan %Labbb yang menunjang kegiatan belajar mengajar.

Tabel 15  
Indikator Kualitas Layanan Pendidikan Misi K3  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

No.	Jenis Indikator	Satuan	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	% Siswa Baru TK (%SB TK)	persentase	49.21	-	-	-
2	% Guru Layak (% GL)	persentase	65.85	71.96	91.62	72.83
3	Rasio Siswa per Guru (R-S/G)	siswa	9	5	8	7
4	Angka Lulusan (AL)	persentase	97.87	101.03	119.61	104.75
5	Angka Mengulang (AU)	persentase	1.57	0.44	0.37	1.05
6	Angka Putus Sekolah (APS)	persentase	0.06	0.38	0.40	0.21
7	% Ruang Kelas baik (%RKb)	persentase	64.78	68.42	76.55	67.85
8	% Perpustakaan baik (%Perpusb)	persentase	48.40	52.23	58.22	50.61
9	% Ruang UKS baik (%RUKSb)	persentase	25.14	18.94	21.64	23.26
10	% R. Komputer baik (%RKomb)	persentase	11.08	18.37	59.38	19.36
11	% Laboratorium baik (%Labbb)	persentase	-	61.84	29.81	37.72

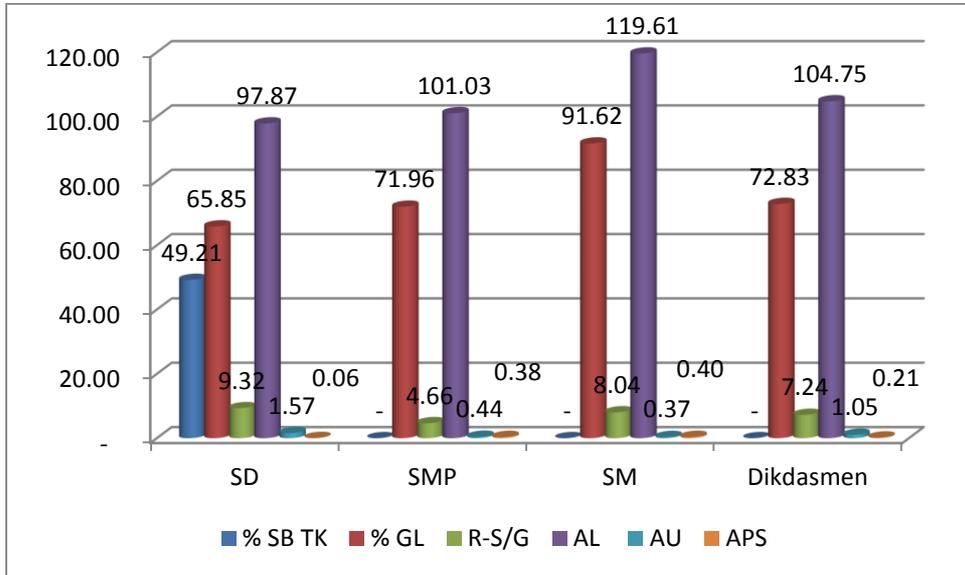
Berdasarkan Tabel 16, %SB yang berasal dari TK idealnya adalah 100% karena menurut penelitian siswa baru SD yang berasal dari TK/PAUD sudah siap untuk belajar di SD dan mudah bersosialisasi dengan teman-teman sekelasnya. Pada kenyataannya di Provinsi Aceh baru sekitar 50% siswa baru SD yang berasal dari TK/PAUD. %GL atau persentase guru yang layak mengajar yaitu guru yang berijazah  $\geq$  D4/S1 tertinggi di Provinsi Aceh untuk jenjang SD baru mencapai 65,85%, jenjang SMP baru mencapai 71,96% sedangkan SM sudah cukup tinggi karena telah mencapai 91,62%. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan maka guru SD yang belum layak mengajar harus disetarakan dan merupakan kebijakan yang diprioritaskan oleh pemerintah Provinsi Aceh, namun peningkatan kualitas guru lainnya juga harus dilaksanakan karena %GL tertinggi di jenjang SMP juga masih dibawah angka 90%. Oleh karena itu, program peningkatan kualitas guru perlu diprioritaskan agar guru dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kelayakan mengajar guru akan meningkat. %GL dikdasmen baru mencapai 72,83% sehingga masih diperlukan penyeteraan sebesar 27,17% guru dikdasmen.

R-S/G di Provinsi Aceh cukup kecil bahkan jauh dibawah standar yang digunakan. Standar yang digunakan untuk R-S/G untuk SD adalah 17, untuk jenjang SMP 15 dan untuk jenjang SM sebesar 12. Berdasarkan tabel 15 diketahui bahwa R-S/G jenjang SD sebesar 9, jenjang SMP sebesar 5 dan jenjang SM sebesar 8. Hal ini berarti bahwa guru yang disiapkan untuk sekolah sudah cukup besar bahkan bisa jadi adanya kelebihan guru. Akan tetapi perlu dilihat pemerataan di masing-masing sekolah. Secara total di provinsi terjadi kelebihan guru tetapi karena tidak terjadi pemerataan maka

proses belajar mengajar di satuan pendidikan tidak bisa berjalan dengan layak.

Angka Lulusan (AL) idealnya adalah 100%. AL di Provinsi Aceh sudah bagus karena untuk jenjang SD sudah mencapai 97,87%. Untuk jenjang SMP dan SM angka lulusannya sudah lebih dari 100% karena banyak yang lulus dari kesetaraan paket B dan paket C. Angka mengulang (AU) dan Angka putus sekolah (APS) idealnya adalah 0%. Angka mengulang di Provinsi Aceh untuk jenjang SMP dan SM sudah cukup kecil karena dibawah 1% walaupun tidak mencapai 0% tetapi hal ini sudah cukup bagus. Angka mengulang SD masih diatas 1% yaitu sebesar 1,57%, jenjang SMP 0,44% dan jenjang SM sebesar 0,37%. Besarnya jumlah siswa mengulang di SD perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Provinsi Aceh supaya jumlah siswa mengulang bisa diminimalkan sehingga biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa lebih efisien karena jika ada siswa yang mengulang berarti ada waktu dan biaya yang terbuang. Angka putus sekolah (APS) di Provinsi Aceh juga sudah cukup kecil karena untuk semua jenjang sudah dibawah 1% dimana jenjang SD sebesar 0,06%, jenjang SMP sebesar 0,38% dan jenjang SM sebesar 0,37%. Walaupun angka putus sekolah sudah cukup rendah tetapi secara nominal masih lumayan cukup banyak. Bahkan di jenjang SMP secara nominal lebih dari 1000 anak yang mengalami putus sekolah. Anak-anak yang putus sekolah ini pada akhirnya akan menjadi beban negara karena rendahnya pendidikan akan mengakibatkan daya jual akan semakin rendah yang pada akhirnya tidak bisa bekerja di sektor formal. Secara total jumlah siswa yang putus sekolah diprovinsi Aceh di jenjang pendidikan dasar dan menengah mencapai 2.295 siswa.

Grafik 15  
 Persentase Kualitas SDM Dikdasmen  
 Provinsi Aceh  
 Tahun 2014/2015

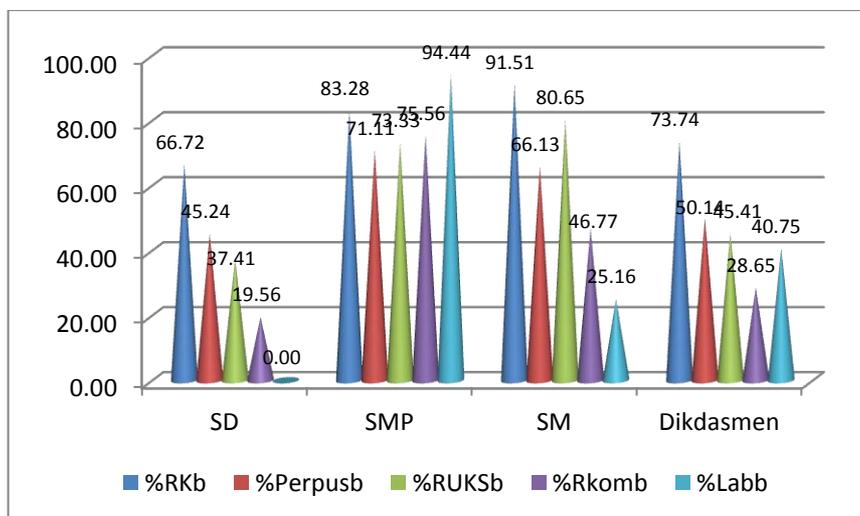


Dalam rangka meningkatkan kualitas prasarana pendidikan yang terdapat pada Tabel 15 dan Grafik 16 maka %Rkb idealnya adalah 100%. Di Provinsi Aceh, %Rkb terbesar di jenjang SM sebesar 76,6% sedangkan untuk jenjang SD sebesar 64,8% dan 68,4%. Jadi masih banyak ruang kelas yang dalam kondisi rusak. Untuk itu, program rehabilitasi ruang kelas sebagai tempat belajar perlu di prioritaskan karena masih banyak yang dalam kondisi rusak. Untuk jenjang SD masih ada sekitar 35,2% ruang kelas yang rusak, sedangkan untuk jenjang SMP sebanyak 31,6% dan jenjang SM sebanyak 23,4% dalam kondisi rusak. Secara global untuk semua jenjang masih ada 32,2% ruang kelas dalam kondisi rusak.

Prasarana lainnya adalah perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, dan laboratorium idealnya adalah 100%. Di Provinsi Aceh masih banyak ruang perpustakaan masih dalam kondisi rusak. Hanya 48,4% ruang perpustakaan jenjang SD dalam kondisi baik. Berarti lebih dari 50% ruang perpustakaan jenjang SD dalam kondisi rusak. Untuk jenjang SMP hanya 52,2% ruang perpustakaan yang berada dalam kondisi baik, sedangkan untuk jenjang SMA hanya 58,2% ruang perpustakaan dalam kondisi baik. Secara keseluruhan jenjang pendidikan dasar dan menengah hanya ada 49,4% ruang

perpustakaan yang berada dalam kondisi baik. Kondisi ruang UKS di Provinsi Aceh sungguh memprihatinkan. Untuk jenjang SD hanya 25,1% dari ruang UKS yang berada dalam kondisi baik. Untuk jenjang SMP dan SM bahkan lebih sedikit yang berada dalam kondisi baik. Untuk jenjang SMP 18,9% dan jenjang SM 51,6%. Secara total pendidikan dasar dan menengah hanya 23,3% ruang UKS yang berada dalam kondisi baik. Untuk ruang komputer, hanya jenjang SM yang memiliki ruang komputer dalam kondisi baik lebih dari 50%. Untuk jenjang SD sebagian besar ruangnya dalam kondisi rusak. Hanya 11,1% yang dalam kondisi baik. Untuk jenjang SMP hanya 18,4% ruang komputernya dalam kondisi baik. Ruang laboratorium untuk jenjang SMP sebagian besar dalam kondisi baik. Hanya 38,2% yang dalam kondisi rusak. Akan tetapi untuk jenjang SM dalam kondisi sebaliknya. Hanya 29,8% ruang laboratorium di jenjang SM berada dalam kondisi baik. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian pemerintah khususnya Provinsi Aceh terhadap prasarana sekolah seperti ruang kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang komputer, dan laboratorium karena masih banyak yang dalam kondisi rusak. Hal ini berarti peningkatan mutu prasarana di semua jenjang pendidikan masih perlu diupayakan.

Grafik 16  
 Persentase Kualitas Prasarana Dikdasmen  
 Provinsi Aceh  
 Tahun 2014/2015



d. Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan: Misi K4

Untuk dapat melihat kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan maka digunakan ukuran dari segi jenis kelamin seperti PG APK dan IPG APK serta dari segi status sekolah seperti %S-Swt.

Berdasarkan Tabel 16 dan Grafik 17, PG APK idealnya adalah 0, artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan IPG APK idealnya 1, artinya sudah setara antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan Gender (PG) untuk APK di provinsi Aceh masih cukup lebar. Nilai masih diatas 1 atau -1. PG APK jenjang SD sebesar 1,10% yang berarti laki-laki lebih besar daripada perempuan, PG APK jenjang SMP -2,19 yang berarti perempuan lebih banyak yang sekolah dan jenjang SM sebesar -5,47. Dengan nilai PG APK dikdasmen sebesar -1,20% d yang berarti prosentasi anak perempuan lebih bayak daripada anak laki-laki usia sekolah 7-18 tahun. Demikian juga dengan nilai IPG APK. Dari nilai IPG terlihat masih ada perbedaan gender dalam persentase anak usia sekolah 7-18 yang bersekolah. Anak perempuan lebih banyak persentasenya yang sekolah dibandingkan dengan anak lakai-laki. Nilai IPG APK untuk pendidikan dasar dan menengah sebesar 1,01 yang berarti hampir setara. Kesetaraan juga dilihat dari sekolah swasta dan negeri, makin besar nilainya berarti makin besar partisipasi swasta dan disesuaikan dengan standar. Untuk jenjang SM jumlah anak bersekolah di sekolah swasta mencapai 18,14% sedangkan SMP 21,69% dan SD hanya 6,5%. Ini berarti bahwa masih sedikit anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta. Pemerintah daerah masih memegang peran penting dalam memajukan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan peran swasta masih kecil. Hal ini terlihat dari persentase siswa yang bersekolah di swasta masih sedikit.

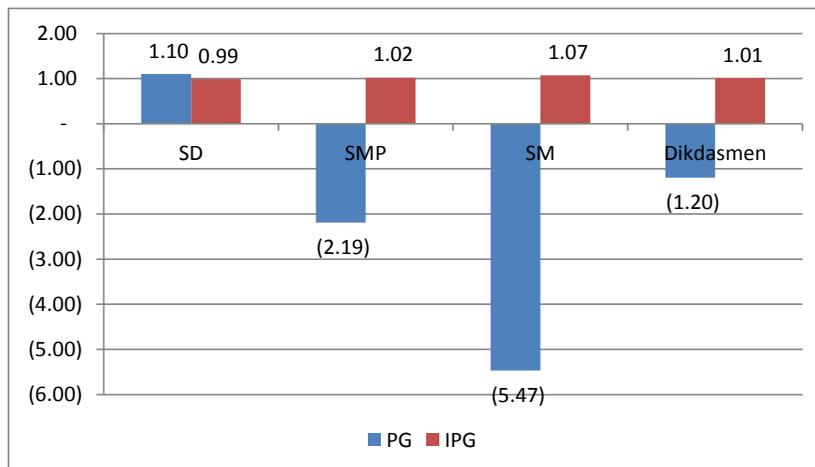
**Tabel 16**  
**Indikator Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan Misi K4**  
**Provinsi Aceh**  
**Tahun 2014/2015**

No.	Jenis Indikator	Satuan	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Perbedaan Gender APK (PG APK)	persentase	1.10	-2.19	-5.47	-1.20
2	Indeks Paritas Gender APK (IPG APK)	indeks	0.99	1.02	1.07	1.01
3	% Siswa Swasta (% S-Swt)	persentase	6.50	21.69	18.14	12.66

Catatan:

- 1 PG APK negatif berarti perempuan lebih baik dari laki-laki, positif berarti laki-laki lebih baik dari perempuan, idealnya = 0
- 2 IPG APK >1 berarti perempuan lebih baik dari laki-laki, <1 berarti laki-laki lebih baik dari perempuan, idealnya = 1
- 3 % S-Swt dihitung dari siswa yang berada di sekolah swasta dibagi dengan siswa seluruhnya (negeri dan swasta)

**Grafik 17**  
**PG dan IPG APK Dikdasmen**  
**Provinsi Aceh**  
**Tahun 2014/2015**



**e. Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan: Misi K5**

Untuk dapat melihat kepastian memperoleh layanan pendidikan maka digunakan empat ukuran, yaitu seberapa banyak siswa sudah dilayani melalui APK, sejauh mana akses masuk sekolah melalui AMM dan siswa yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui AM, sejauh mana siswa

dapat bertahan di sekolah melalui AB5/AB, dan sejauh mana siswa dapat lulus dengan tepat waktu melalui RLB.

Berdasarkan Tabel 17 dan Grafik 18 digunakan dua partisipasi, yaitu APM dan APK, idealnya APM adalah 100% sedangkan APK dapat lebih tinggi dari 100%. APM jenjang SD sebesar 83,93%, jenjang SMP sebesar 72,19% dan jenjang SM sebesar 50,73%, sehingga dikdasmen sebesar 73,06%. Berdasarkan perhitungan APK, ternyata APK tertinggi juga terdapat pada jenjang SD sebesar 104,51% sedangkan yang terendah pada jenjang SM sebesar 79,91%, sehingga dikdasmen sebesar 98,26% yang telah mendekati angka 100%. Lebih rendahnya APK di jenjang SM menunjukkan partisipasi yang rendah jika dibandingkan dengan jenjang lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jenjang SD mempunyai kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan jenjang SMP dan jenjang SM karena anak yang bersekolah di jenjang SD paling banyak jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya yang lebih tinggi.

AMM jenjang SD belum diketahui idealnya. Besarnya AMM ini menunjukkan banyaknya orang tua yang telah memprioritaskan anaknya untuk bersekolah di jenjang SD dalam usia yang sesuai. Pada kenyataannya, AMM jenjang SD sebesar 43,92%. Lulusan jenjang SD dan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMP dan SM idealnya adalah 100%. Lulusan jenjang SD yang melanjutkan ke jenjang SMP sebesar 86,86% sudah cukup baik karena telah mencapai lebih dari 80%. Lulusan jenjang SMP yang melanjutkan ke jenjang SM sebesar 83,43% sangat baik karena sudah mencapai angka diatas 80%. Besarnya AMM jenjang SMP dan SM terjadi karena besarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anaknya walaupun jumlah sekolah

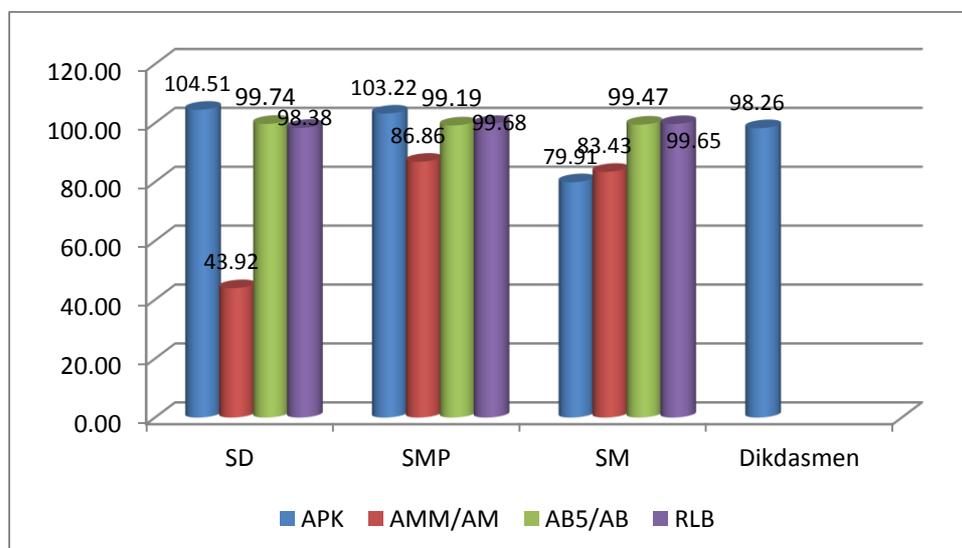
di jenjang SMP. Kecilnya AMM di tingkat SD terjadi karena banyak anak-anak yang mulai masuk jenjang SD yang usianya diluar 7 tahun.

Tabel 17  
Indikator Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan: Misi K5  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

No.	Jenis Indikator	Satuan	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Angka Partispasi Murni (APM)	persentase	83.93	72.19	50.73	73.06
2	Angka Partispasi Kasar (APK)	persentase	104.51	103.22	79.91	98.26
3	Angka Masukan Murni (AMM)/Angka Melanjutkan (AM)	persentase	43.92	86.86	83.43	-
4	Angka Bertahan tk 5 (AB5)/Angka Bertahan (AB)	persentase	99.74	99.19	99.47	-
5	Rata2 Lama Belajar (RLB)	tahun	6.10	3.01	3.01	-

AB5 jenjang SD, AB jenjang SMP dan SM idealnya adalah 100%. AB5 jenjang SD sebesar 99,74% sudah mendekati ideal, sedangkan AB jenjang SMP dan SM masing-masing sebesar 99,19% dan 99,47% sudah mendekati ideal.

Grafik 18  
APK, AMM/AM, AB5/AB, dan RLB Dikdasmen  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015



RLB SD idealnya adalah 6 tahun, RLB SMP dan SM idealnya adalah 3 tahun. Pada kenyataannya, RLB jenjang SD sebesar 6,10 tahun belum ideal karena belum sesuai standar akibat siswa lulus tidak tepat waktu, adanya siswa mengulang, sehingga terdapat beberapa siswa lulus dalam waktu 6 tahun, 7 tahun, atau 8 tahun. Jenjang SMP dan jenjang SM masing-masing sebesar 3.01 tahun hampir ideal karena sudah mendekati angka standar.

### 3. Analisis Indikator

Indikator misi pendidikan 5K digunakan untuk menilai kinerja program pembangunan pendidikan. Indikator Misi K1 digunakan untuk menilai ketersediaan layanan pendidikan yang dapat dicapai, indikator Misi K2 digunakan untuk menilai keterjangkauan layanan pendidikan yang dapat dicapai, indikator Misi K3 digunakan untuk menilai kualitas layanan pendidikan, indikator Misi K4 digunakan untuk menilai kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan indikator Misi K5 digunakan untuk menilai kepastian memperoleh layanan pendidikan. Gabungan dari kelima indikator tersebut untuk menilai kinerja program pembangunan pendidikan.

Indikator yang dapat dilakukan analisis untuk dikdasmen adalah yang dimiliki oleh ketiga jenjang tersebut. Indikator tersebut disajikan pada Tabel 18. Untuk indikator misi pendidikan 5K maka indikator yang tidak digunakan dalam analisis adalah APM (Misi K5) karena APM mengukur yang sama dengan APK agar tidak terjadi duplikasi.

Tabel 18  
Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi 5 K  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

Misi	No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Dikdasmen
Misi K1	1	Rasio S/K	21	25	27	23
	2	Rasio K/RK	1.05	0.90	0.92	0.99
	3	% Perpustakaan	68.25	67.56	64.35	67.56
	4	% Ruang UKS	27.26	20.99	22.92	25.25
	5	% R. Komputer	11.31	23.32	65.28	21.43
	6	% Tempat Olahraga	32.00	29.47	32.87	31.55
	7	% Laboratorium	-	73.85	32.64	42.81
Misi K2	1	TPS	43	53	66	54
	2	DT	147	196	319	182
	3	SB	-	-	-	-
Misi K3	1	% SB TK	49.21	-	-	-
	2	% GL	65.85	71.96	91.62	72.83
	3	R-S/G	9	5	8	7
	4	AL	97.87	101.03	119.61	104.75
	5	AU	1.57	0.44	0.37	1.05
	6	APS	0.06	0.38	0.40	0.21
	7	% RKb	64.78	68.42	76.55	67.85
	8	% Perpus baik	48.40	52.23	58.22	50.61
	9	% RUKS baik	25.14	18.94	21.64	23.26
	10	% RKom baik	11.08	18.37	59.38	19.36
	11	% Lab baik	-	61.84	29.81	37.72
Misi K4	1	PG APK	1.10	(2.19)	(5.47)	(1.20)
	2	IPG APK	0.99	1.02	1.07	1.01
	3	% S-Swt	6.50	21.69	18.14	12.66
Misi K5	1	APK	104.51	103.22	79.91	98.26
	2	AMM/AM	43.92	86.86	83.43	-
	3	AB5/AB	99.74	99.19	99.47	-
	4	RLB	6.10	3.01	3.01	-

Tabel 19 menunjukkan nilai setiap indikator setelah dikonversi menggunakan standar yang terdapat pada Tabel 1. Untuk mengetahui bagaimana ketersediaan layanan, keterjangkauan layanan, kualitas layanan, kesetaraan dalam memperoleh layanan, dan kepastian dalam memperoleh

layanan pendidikan dapat dilihat dari besarnya nilai rata-rata Misi K1 sampai K5. Berdasarkan analisis dari misi pendidikan 5K tersebut maka nilai rata-rata Misi K1 sampai K5 merupakan pencapaian kinerja pendidikan.

Indikator misi K1 yang mengalami konversi adalah R-S/K dan R-K/RK. Indikator misi K2 semuanya mengalami konversi. Indikator Misi K3 yang mengalami konversi adalah R-S/G sedangkan indikator tidak mengalami konversi karena standarnya 100 dan 0. Untuk nilai 0 maka hasilnya adalah 100 dikurangi nilainya. Indikator Misi K4 yang mengalami konversi adalah %S-Swt. Indikator Misi K5 yang mengalami konversi adalah RLB.

Tabel 19  
 Nilai Indikator menurut Jenjang Pendidikan  
 Provinsi Aceh  
 Tahun 2014/2015

Misi	No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Dikdasmen
Misi K1	1	Rasio S/K	100.00	100.00	100.00	100.00
	2	Rasio K/RK	94.84	89.69	91.75	92.09
	3	% Perpustakaan	68.25	67.56	64.35	67.56
	4	% Ruang UKS	27.26	20.99	22.92	25.25
	5	% R. Komputer	11.31	23.32	65.28	21.43
	6	% Tempat Olahraga	32.00	29.47	32.87	31.55
	7	% Laboratorium	-	73.85	32.64	53.25
Misi K2	1	TPS	100.00	100.00	93.92	97.97
	2	DT	100.00	100.00	100.00	100.00
	3	SB (Rp)	-	-	-	-
Misi K3	1	% SB TK	49.21	-	-	-
	2	% GL	65.85	71.96	91.62	72.83
	3	R-S/G	58.24	31.05	66.97	52.09
	4	AL	97.87	100.00	100.00	100.00
	5	AU	98.43	99.56	99.63	98.95
	6	APS	99.94	99.62	99.60	99.79
	7	% RK baik	64.78	68.42	76.55	67.85
	8	% Perpustakaan baik	48.40	52.23	58.22	50.61
	9	% RUKS baik	25.14	18.94	21.64	23.26
	10	% RKom baik	11.08	18.37	59.38	19.36
	11	% Lab baik	-	61.84	29.81	37.72
Misi K4	1	PG APK	98.90	97.81	94.53	98.80
	2	IPG APK	98.95	97.90	93.39	98.79
	3	% S-Swt	64.97	86.77	36.28	62.67
Misi K5	1	APK	100.00	100.00	79.91	98.26
	2	AMM/AM	87.84	86.86	83.43	86.04
	3	AB5/AB	100.00	99.19	99.47	99.56
	4	RLB	98.38	99.68	99.65	99.24

Indikator Misi K1 setelah mengalami konversi, R-S/K jenjang SD menjadi 100,00, jenjang SMP menjadi 100,00, dan jenjang SM menjadi 100,00 sehingga dikdasmen menjadi 100,00. R-K/RK jenjang SD menjadi 94,84,

jenjang SMP menjadi 89,69, dan jenjang SM menjadi 91,75 sehingga dikdasmen menjadi 92,09. Sebanyak lima indikator prasarana lainnya tidak mengalami konversi. %Perpus terbaik pada jenjang SD sebesar 68,25% dan persentase kepemilikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah sebesar 67,56%. Kepemilikan ruang UKS di semua jenjang sangat kecil. Hanya 25,25% sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mempunyai ruang UKS. Untuk kepemilikan ruang komputer hanya 21,43% sekolah yang memilikinya sedangkan untuk kepemilikan tempat olahraga hanya 31,55% dan untuk kepemilikan laboratorium hanya 53,25%.

Indikator Misi K2 setelah mengalami konversi, TPS jenjang SD menjadi 100,00, jenjang SMP menjadi 100,00, dan jenjang SM menjadi 93,92, sedangkan Dikdasmen menjadi 97,97. DT jenjang SD menjadi 100,00, jenjang SMP menjadi 100,00, dan jenjang SM menjadi 100,00, sedangkan Dikdasmen menjadi 100,00.

Indikator Misi K3 yang mengalami konversi adalah R-S/G dengan jenjang SD menjadi 58,24, jenjang SMP menjadi 31,05 dan jenjang SM menjadi 66,97, sedangkan dikdasmen menjadi 52,09. Untuk sumber daya manusia maka %SB TK jenjang SD sebesar 49,21, %GL terbaik adalah jenjang SM sebesar 91,62 dan terburuk jenjang SD sebesar 65,85, sedangkan dikdasmen sebesar 72,83. AL untuk semua jenjang sudah mencapai 100 kecuali SD sebesar 97,87. Nilai konversi untuk AU sudah mencapai diatas 90% yang berarti hanya sedikit persentase siswa yang mengulang. Demikian juga untuk angka putus sekolah. Bila dilihat dari prasarana pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah maka %Rkb bernilai 67,85, %Perpusb bernilai 60,61, %RUKSb bernilai 23,26, %Rkomb bernilai 19,36, dan %Lab bernilai 37,72.

Indikator Misi K4 ada 3 yaitu PG APK, IPG APK dan %S-Swt. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah nilai AP APK sebesar 98,80, IPG APK bernilai 98,79 dan %S-Swt bernilai 62,67.

Indikator Misi K5, APK jenjang SD dan SMP sudah mencapai 100,00 sebesar 100,00 sedangkan jenjang SM sebesar 79,91, sedangkan dikdasmen sebesar 98,26. AMM SD sebesar 87,84, sedangkan AM SMP sebesar 86,86 jenjang AM SM sebesar 83,43 sedangkan dikdasmen sebesar 86,04. AB5 SD sebesar 100,00 dan AB SMP dan SM masing-masing sebesar 99,19 dan 99,47. RLB jenjang SD mencapai 98,38, jenjang SMP sebesar 99,68 sedangkan jenjang

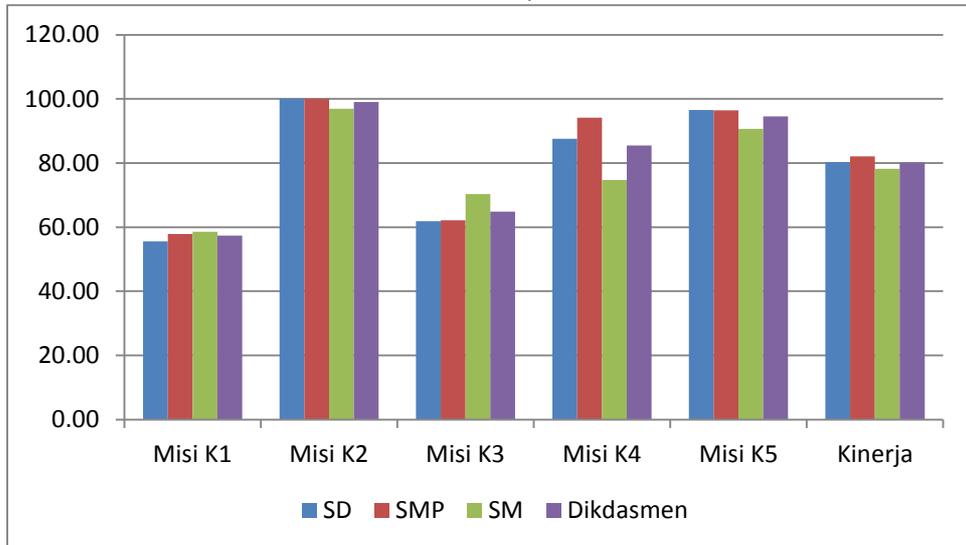
SM mencapai 99,65. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah RLB mencapai 99,24.

Berdasarkan Tabel 20 dan Grafik 19 diketahui bahwa Provinsi Aceh untuk misi K1 yaitu ketersediaan layanan pendidikan mencapai 57,33 yang berarti masuk dalam kategori kurang. Untuk semua jenjang nilai misi K1 masih dalam kategori kurang. Untuk misi K2 sudah mencapai nilai 98,99 yang berarti masuk dalam kategori paripurna. Untuk misi K3 mencapai nilai 64,81 yang berarti masuk dalam kategori kurang. Untuk misi K4 yaitu kesetaraan, nilai yang dicapai sebesar 85,50 yang berarti masuk dalam kategori utama. Untuk misi K5 yaitu kepastian, nilai yang bisa dicapai sebesar 80,23 yang berarti masuk kategori pratama. Kalau dilihat berdasarkan jenjang, maka jenjang SD mencapai nilai 80,33 dengan kategori pratama, jenjang SMP mencapai nilai 82,13 dengan kategori pratama dan jenjang SM mencapai nilai 78,24 dengan kategori kurang. Secara keseluruhan kinerja pendidikan yang dicapai Provinsi Aceh sebesar 80,23 dengan kategori 80,23

Tabel 20  
Pencapaian Kinerja Dikdasmen  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015

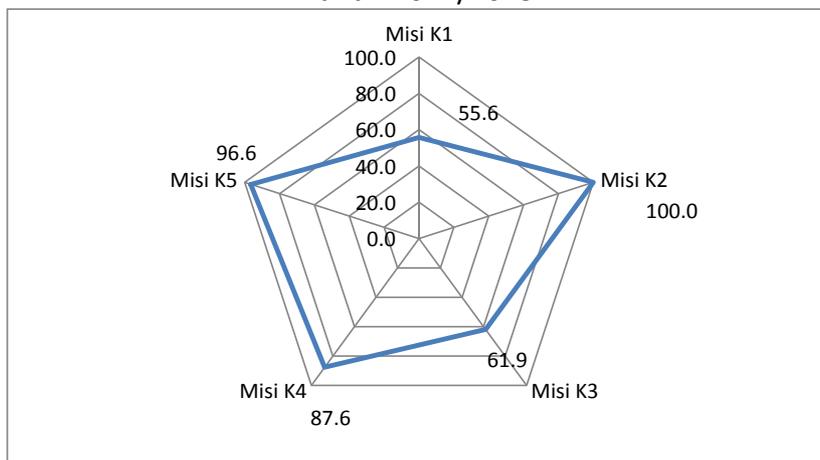
Misi	SD	SMP	SM	Dikdasmen	Jenis
Misi K1	55.61	57.84	58.54	57.33	KURANG
Misi K2	100.00	100.00	96.96	98.99	PARIPURNA
Misi K3	61.89	62.20	70.34	64.81	KURANG
Misi K4	87.61	94.16	74.73	85.50	MADYA
Misi K5	96.56	96.43	90.61	94.53	UTAMA
Kinerja	80.33	82.13	78.24	80.23	PRATAMA
Jenis	PRATAMA	PRATAMA	KURANG	PRATAMA	

**Grafik 19**  
**Kinerja Program Dikdasmen Menurut Jenjang dan Berdasarkan Misi 5K**  
**Provinsi Aceh**  
**Tahun 2014/2015**

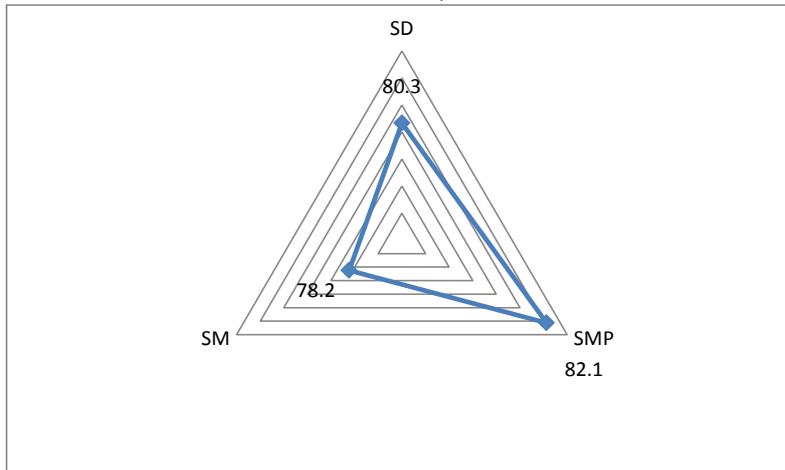


Kinerja dikdasmen berdasarkan misi pendidikan 5K dapat lebih jelas terlihat menggunakan sarang laba-laba pada Grafik 20, menunjukkan bahwa terbaik adalah misi K2 sebesar 98,99 termasuk kategori paripurna dan terburuk adalah misi K1 sebesar 57,33 termasuk kategori kurang.

**Grafik 20**  
**Kinerja Dikdasmen Berdasarkan Misi Pendidikan 5K**  
**Provinsi Aceh**  
**Tahun 2014/2015**



Grafik 21  
Kinerja Dikdasmen Menurut Jenjang Pendidikan  
Provinsi Aceh  
Tahun 2014/2015



Kinerja dikdasmen menurut jenjang pendidikan dapat lebih jelas terlihat menggunakan sarang laba-laba pada Grafik 21, menunjukkan bahwa terbaik adalah jenjang SMP sebesar 82,13 termasuk kategori pratama dan terburuk adalah jenjang SM sebesar 78,24 termasuk kategori kurang.

## VI. PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan analisis indikator dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Nilai Kinerja Pendidikan yang dicapai Provinsi Aceh sebesar 80,23 yang berarti masuk dalam kategori pratama.
- b. Misi K2 mempunyai nilai yang terbaik diantara kelima misi. Nilai yang dicapai sebesar 98,99 yang berarti masuk dalam kategori paripurna. Besarnya nilai misi K2 ini karena nilai TPS dan DT untuk Provinsi Aceh sudah baik. Jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah sudah mencukupi untuk menampung penduduk usia sekolah.
- c. Misi K1 mempunyai nilai yang terendah diantara misi yang lain. Nilai yang dicapai sebesar 57,33 yang berarti masuk dalam kategori kurang. Kecilnya nilai misi K1 ini terjadi karena banyak sekolah yang belum memiliki prasarana sekolah seperti ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga dan ruang laboratorium.
- d. Nilai Misi K3 juga masih termasuk dalam kategori kurang yaitu 64,81. Hal ini disebabkan banyaknya prasarana pendidikan yang masih dalam kondisi rusak.
- e. APK dan APM jenjang SM masih rendah.
- f. Masih banyak guru yang tidak layak mengajar di jenjang SD dan SMP.

### 2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka untuk meningkatkan kinerja pendidikan provinsi Aceh maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

- a. Perlu pembangunan prasarana pendidikan seperti ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga dan laboratorium di semua jenjang.
- b. Perlu rehabilitasi prasarana yang ada supaya dalam kondisi baik sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar.

- c. Perlu peningkatan APK dan APM jenjang SM dengan membangun sekolah jauh supaya akses untuk sekolah menengah menjadi mudah bagi daerah-daerah yang belum terlayani sekolah menengah.
- d. Perlu peningkatan kelayakan guru di jenjang SD dan SMP dengan dilakukan banyak pelatihan guru dan memberikan beasiswa kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Kelola Dana Otsus Rp 27,3 Triliun,  
<http://nasional.tempco.co/read/news/2013/05/14/058480416/aceh-kelola-dana-otsus-rp-27-3-triliun>, 14 Mei 2013
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2014, Aceh Dalam Angka 2014, Banda Aceh
- Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2014, Subulussalam Dalam Angka 2014, Subulussalam
- Ida Kintamani, 2013. Indikator Misi Pendidikan 5K Berdasarkan Rencana Strategis Pendidikan 2010-2014. Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Indonesia
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Simeulue.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Aceh Singkil.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Aceh Selatan.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Aceh Tenggara.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Aceh Timur.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Aceh Tengah.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Aceh Barat.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Aceh Besar.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Pidie.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Bireuen.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Aceh Utara.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Gayo Lues.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Aceh Tamiang.

Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Nagan Raya.

Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Aceh Jaya.

Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Bener Meriah.

Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kabupaten Pidie Jaya.

Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kota Banda Aceh.

Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kota Sabang.

Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kota Langsa.

Isian Instrumen Profil Pendidikan 2014 Kota Lhokseumawe.

Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*, Jakarta

Mutu Pendidikan di Aceh Masih Rendah. Anggaran pendidikan melimpah, namun tingkat pendidikan di Aceh masih sangat rendah

<http://sinarharapan.co/news/read/140516023/Mutu-Pendidikan-di-Aceh-Masih-Rendah>, 16 Mei 2014